

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**(Studi pada Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010 - 2014)**



SKRIPSI

Oleh :

Rozaq Yomara

11312458

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**(Studi pada Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2010 - 2014)**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana
Strata-1 program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : RozaqYomara

Nomor Mahasiswa : 11312458

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya yang atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman dan sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 28 Juli 2016

Penulis


Rozaq Yomara
(Rozaq Yomara)

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

(Studi pada Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2010 - 2014)

SKRIPSI

Diajukan oleh :

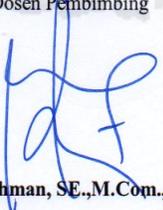
Nama : Rozaq Yomara

Nomor Mahasiswa : 11312458

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal^{28/7}.....¹⁶

Dosen Pembimbing


Arief Rahman, SE.,M.Com., P.hD

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DIY**

Disusun Oleh : ROZAQ YOMARA

Nomor Mahasiswa : 11312458

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari Kamis, tanggal: 18 Agustus 2016

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Arif Rahman, SIP., SE., M.Com.,Ph.D.

Penguji : Erna Hidayah, Dra., M.Si.,Ak., CA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia



Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

HALAMAN MOTTO

Jika kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. **(W.S. Rendra)**

Karena mampukah kita, berasal dari siapa pribadi.

(Yuliani Iriana Sitompul)

Hanya sebuah wacana akan semua mimpi besar mu,
jika tak ada diri sendiri untuk mimpi besar mu. **(Rozaq Yomara)**

If you really want to do something, you'll find a way. If you don't, you'll find an
excuse. **(Jim Rohn)**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulispanjatkankepada Allah SWT,atas segala rahmat, nikmat, karuniadanhidayah yang dianugerahkan pada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang revolusioner sejati, yang telah membawa dan mengarahkan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh akan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua termasuk umat Rasulullah SAW hingga hari kiamat nanti.

Karya kecil ini, penulis persembahkan untuk :

BapakMulvoUtomo, SH dan IbuSiti Sahara

Selaku orang tua yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan, perhatian dan doa yang takpernahsurut.

Rosyida Mutiara dan Rahmaniah Yosira

Selaku adik – adik yang selalu punya cara untuk menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah Robbil'aalamiin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'alla, atas segala rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa selama menjalani proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan berupa bimbingan, dorongan, motivasi, masukan, dan doa yang diperlukan penulis dari mulai persiapan hingga tersusunnya skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. D. Agus Hardjito, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dekar Urumsah, SE, S.Si, M.Com, Ph.D.,selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan dukungan bagi seluruh mahasiswa Akuntansi.
3. Bapak Hendi Yogi Prabowo, SE, M.For.Accy.,selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendampingi dan memberikan bimbingan serta nasehat-nasehat selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Arief Rahman, SE, M.Com. Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam pengerjaan penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh motivasi.
5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atas semua ilmu, bimbingan serta pengalaman yang dibagikan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pihak/karyawan Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah banyak membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan.
7. Keluarga tercinta, Bapak Mulyo Utomo, SH, Ibu Siti Sahara, adik – adik, Rosyida Mutiara dan Rahmaniah Yosira, sertaseluruh keluarga besar penulis. Terima kasih atas semangat, cinta, kasih sayang, dukungan, saran, dedikasi, masukan serta doa yang tak ada putusnya diberikan kepada penulis. Semoga karyaskripsiinibisamembahagiakan kalian semua.
8. Dyah Aprilia Septiyani, S.Psi. Terima kasih untuk semangat, canda tawa, kritik, dan segala bantuannya kepada penulis selama proses menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dari zaman awal perkuliahan, teman – teman *Output Character Building* kelas K 2011 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, terkhusus kepada Achmad Ardani dan Surya Ramdhani. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan dan memiliki manfaat buat masyarakat.

10. Teman – teman Kos Pondok Intam, terkhusus kepada Andi Setiawan, Tezhar Rayendra, M. Karim Nurhuda, Wahyu Alangga, Sandhi Hidayat, dan Idham Hamidi. Canda tawa, dukungan, dan masukan kalian selalu melekat di ingatan penulis.
11. Teman – teman alumni TSC Camp 2010, terkhusus kepada Aji Bagus, Ayu Pratiwi, Mei Hanifah, M. Hafidz Syaifullah, Rochmad Desiyanto, Ryan Hendrich, Tommy Putra dan Yuliani Iriana Sitompul. Kalian Istimewa!
12. Para sahabat, Faizal Hermawan Hartina Mukfi, Zulfia Arnisa, yang tak bosan mendukung penulis, tak peduli seberapa jauhnya terpisah jarak.
13. Dea Ranita Ulfah, SE. Terimakasih untuk tidak pernah lelah memberi semangat mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
14. Keluarga besar Lembaga Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Indonesia periode 2013-2014, terkhusus kepada teman-teman di Bidang Jaringan Advokasi, serta teman-teman di Bidang yang lain tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas pengalaman, ilmu, pengetahuan yang sangat amat berharga selama satu periode, mengisi makna kekeluargaan dan ghirah perjuangan bersama-sama.
15. Teman-teman Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia angkatan 2011. Kebersamaan, kekeluargaan, serta saling keterbukaan satu sama lain, akan selalu teringat oleh penulis. Semogakitasemuadapatmeraihkesuksesankitamasing – masing.

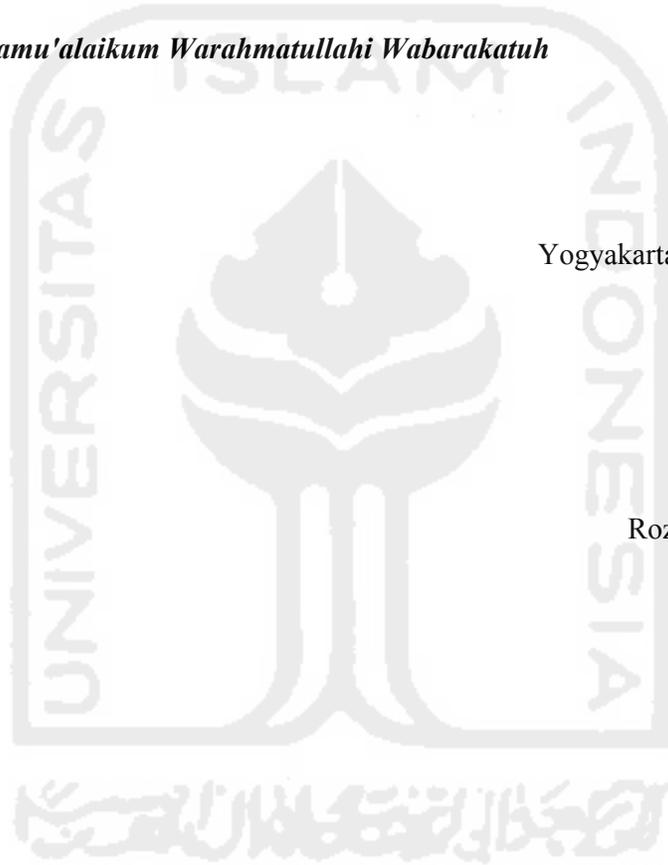
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendoakan penulis. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 28 Juli 2016

Rozaq Yomara



DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Pernyataan Bebas Plagiarisme.....	i
Halaman Pengesahan Dosen Pembimbing.....	ii
Berita Acara Ujian Skripsi.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Lampiran.....	xviii
Abstraksi.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Pembahasan.....	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Pajak Daerah.....	11
2.1.2 Retribusi Daerah.....	17

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	24
2.1.4 Kontribusi	24
2.2 Telaah Penelitian Terdahulu	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel	27
3.2 Jenis dan Sumber Data	27
3.3 Metode Pengumpulan Data	28
3.4 Metode Analisis Data	28

BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum	30
1. DPPKAD Kab. Bantul	30
2. DPPKAD Kab. Gunungkidul	35
3. DPPKA Kab. Kulonprogo	39
4. DISPENDA Kab. Sleman	47
5. DPDPK Kota Yogyakarta	49
4.2 Analisis Data	52
4.2.1 Analisis Deskriptif	52
1. DPPKAD Kab. Bantul	53
2. DPPKAD Kab. Gunungkidul	67
3. DPPKA Kab. Kulonprogo	83
4. DISPENDA Kab. Sleman	98
5. DPDPK Kota Yogyakarta	115
4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian	128

BAB V KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan..... 134

5.2 Saran..... 135

DAFTAR PUSTAKA..... 137

LAMPIRAN..... 139



DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
2.1 Objek dan Tarif Pajak	15
4.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul	53
4.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul	67
4.3 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo	83
4.4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman	98
4.5 Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta	115



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
4.1 Struktur Organisasi DPPKA Kab. Bantul	33
4.2 Struktur Organisasi DPPKAD Kab. Gunungkidul	37
4.3 Struktur Organisasi DPPKAD Kab. Kulonprogo	43
4.4 Struktur Organisasi DISPENDA Kab. Sleman	45
4.5 Struktur Organisasi DPDPK Kota Yogyakarta	48
Laporan Kabupaten Bantul	
4.6 Pajak Penerangan Jalan	54
4.7 Pajak Reklame	55
4.8 Pajak Pengembalian Bahan Galian	56
4.9 Pajak Restoran	57
4.10 Pajak Hiburan	58
4.11 Pajak BPHTB	58
4.12 Pajak Bumi & Bangunan Pedesaan & Perkotaan	59
4.13 Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	60
4.14 Retribusi Pelayanan Kesehatan	61
4.15 Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	62
4.16 Retribusi Pelayanan Pasar	63
4.17 Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	64
4.18 Retribusi IMB	64
4.19 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	65

Laporan Kabupaten Gunungkidul

4.20 Pajak Penerangan Jalanan	68
4.21 Pajak Reklame	69
4.22 Pajak Bahan Galian Gol. C	70
4.23 Pajak Restoran	71
4.24 Pajak Hotel	72
4.25 Pajak BPHTB	72
4.26 Pajak Mineral bukan Logam & Batuan	73
4.27 Pajak Bumi & Bangunan	74
4.28 Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	75
4.29 Retribusi Pelayanan Kesehatan	76
4.30 Retribusi Pelayanan Pasar	77
4.31 Retribusi Penggantian Biaya Akta Capil & KTP	78
4.32 Retribusi Pengukuran & Pengujian Hasil Hutan	79
4.33 Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	79
4.34 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	80
4.35 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	81
4.36 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	81
4.37 Retribusi Tempat Khusus Parkir	82

Laporan Kabupaten Kulonprogo

4.38 Pajak Penerangan Jalan	84
4.39 Pajak Reklame	85
4.40 Pajak Bahan Galian Golongan C	86
4.41 Pajak Restoran	87
4.42 Pajak Hiburan	88

4.43 Pajak Hotel	88
4.44 Pajak BPHTB.....	89
4.45 Pajak Bumi & Bangunan.....	90
4.46 Pajak Mineral bukan Bahan Logam & Batuan.....	90
4.47 Retribusi Pelayanan Kesehatan.....	91
4.48 Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	92
4.49 Retribusi Pelayanan Pasar	93
4.50 Retribusi Penggantian Biaya Akta Capil & KTP	94
4.51 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.....	95
4.52 Retribusi IMB	95
4.53 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	96
4.54 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	97
Laporan Kabupaten Sleman	
4.55 Pajak Penerangan Jalan	99
4.56 Pajak Hotel	100
4.57 Pajak Restoran	101
4.58 Pajak Reklame	102
4.59 Pajak BPHTB.....	103
4.60 Pajak Bumi & Bangunan.....	104
4.61 Pajak Hiburan	105
4.62 Retribusi Pelayanan Kesehatan.....	106
4.63 Retribusi IMB	107
4.64 Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	108
4.65 Retribusi Pelayanan Pasar	109
4.66 Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	110

4.67RetribusiPenggantianBiayaCetak KTP	111
4.68RetribusiIzinGangguan.....	112
4.69RetribusiPelayananKebersihan	113
4.70RetribusiPemakaianKekayaanDaerah.....	114

Laporan Kota Yogyakarta

4.71Pajak Hotel	116
4.72PajakPeneranganJalan	117
4.73PajakRestoran	118
4.74PajakHiburan	119
4.75PajakReklame	119
4.76Pajak BPHTB.....	120
4.77PajakBumidanBangunanPedesaandanPerkotaan	121
4.78RetribusiPelayananPasar	122
4.79RetribusiPelayananKesehatan.....	123
4.80Retribusi IMB	124
4.81Retribusi Terminal	125
4.82RetribusiPelayananParkir di TepiJalanUmum.....	126
4.83RetribusiPelayananKebersihan	127

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. SuratIzinPenelitiandariFakultasEkonomi UII	140
2. Surat IzinPenelitian dari SekdaProvinsi DIY.....	141
3. SuratIzinPenelitiandariKabupatenBantul.....	142
4. SuratIzinPenelitiandariKabupatenGunungkidul.....	143
5. SuratIzinPenelitiandariKabupatenKulonprogo.....	144
6. SuratIzinPenelitiandariKabupatenSleman.....	145
7. SuratIzinPenelitiandariKota Yogyakarta.....	146
8. Laporan Keuangan antar Kabupaten/Kota di DIY.....	147



**ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

**(Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun 2010 - 2014)**

ABSTRACT

The purpose of this study was to measure the contribution of regional tax and Retribution Income income original area between Cities in Yogyakarta special region and see the level of achievement of the realization of tax areas, regional and retribustion income original area compared with the targets set.

The sample of this study was the Department of Revenue financial and Asset Management Areas in all of Cities in Yogyakarta within the period 2010-2014. The data was collected using purposive sampling method and analysis data method using descriptive analysis. The sample consists of 5 local governments in Yogyakarta.

The findings showed that the components of the top 5 income tax levies the highest regions of the area and have a real contribution towards the original income Areas across the city in the Yogyakarta.

Keywords: Local Tax, Retribution Income, and the Original Income Area

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta serta melihat tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

Sampel dari penelitian ini adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/ Dinas terkait di seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam periode 2010-2014. Pengumpulan data menggunakan metode *purposive sampling* dan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Sampel terdiri dari 5 Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komponen 5 besar pendapatan Pajak Daerah dan retribusi daerah tertinggi memiliki kontribusi nyata terhadap pendapatan Asli Daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh karena itu dalam hal ini sudah pasti memerlukan dana dalam rangka pembiayaan pembangunannya. Pada zaman otonomi daerah seperti pada saat ini, Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah (Desentralisasi) untuk menggali sumber – sumber keuangan yang ada. Sejalan dengan desentralisasi ini, pembiayaannya pun ikut terdesentralisasi dan berimplikasi masing – masing daerah yang dituntut untuk dapat membiayai biaya pembangunannya secara mandiri. Keseriusan Pemerintah diwujudkan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disebutkan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang - undangan”.

Kebijakan ekonomi daerah yang bergulir telah bergulir ini menempatkan kabupaten dan kota sebagai titik berat ekonomi, nampaknya telah membawa perubahan dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Hal tersebut sangat baik bagi perkembangan pembangunan daerah di Indonesia, yang tentunya

diharapkan juga dapat berimplikasi baik pada peningkatan pelayanan, perbaikan, kesejahteraan, dan jaminan hidup yang lebih baik kepada masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek penting, daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal agar mampu memenuhi kebutuhan fiskal sehingga tidak mengalami kesenjangan fiskal. Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas daerah tersebut adalah dengan meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar mampu membiayai penyelenggaraan kepentingan Pemerintah Daerah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (Siahaan, 2015). Menurut Undang - Undang No 34 Tahun 2004, pendapatan daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah dalam menjalankan organisasi pemerintahannya memerlukan sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai kegiatannya. Salah satu penerimaan pemerintah tersebut berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah hendaknya didukung upaya pemerintah daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Berdasarkan pengertian di atas, mengandung implikasi bahwa kebijakan otonomi daerah memberikan kesempatan dan kekuasaan yang lebih luas bagi pemerintah daerah (khususnya pada tingkat kabupaten/kota) untuk melakukan berbagai kebijakan publik berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah di daerahnya masing-masing. Dalam mengestimasi potensi pendapatan asli daerah di suatu daerah, diperlukan berbagai informasi dan tolak ukur yang benar – benar terjadi di lapangan secara konkrit diinginkan dan dibutuhkan oleh seluruh komponen masyarakat. Salah satu contoh tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah dalam menjalankan roda keorganisasiannya, sedangkan kemampuan keuangan

daerah ini biasanya diukur dari besarnya proporsi atau kontribusi pendapatan asli daerah terhadap anggaran pendapatan daerah.

Besarnya persentase potensi pendapatan daerah yang bisa digali dari tiap kabupaten/kota dan potensi daerah tersebut dapat menghasilkan pemasukan yang cukup untuk memenuhi target pendapatan asli daerah di tiap – tiap kabupaten/kota. Oleh karena itu, beberapa pihak pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tiap kabupaten/kota dengan menyusun strategi dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki dari setiap potensi yang ada. Upaya peningkatan salah satunya adalah dengan mengoptimalkan tingkat potensi yang ada serta memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ada.

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tingkat sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan asli daerah yang dapat diketahui dengan membandingkan pendapatan asli daerah dalam satu tahun anggaran. Sumber pendapatan asli daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran

atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2011).

Siahaan (2010) menjelaskan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan negara bagi penduduknya secara perorangan. Dengan demikian, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan Pemerintah Daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

Dalam rangka menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan pada berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, agar dapat dipungut secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis mempunyai keinginan untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014?
2. Bagaimanakah pengaruh kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014?
3. Bagaimanakah tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh masing – masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014?

1.3 Batasan Masalah

Data yang digunakan adalah data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2010 sampai 2014. Laporan keuangan merupakan hal terpenting yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh pengguna informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. Namun, tidak semua pengguna informasi laporan keuangan dapat memahami dan menafsirkan informasi yang tertera dalam laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah analisis. Analisis ini hanya dilakukan pada 5 besar pemasukan pajak daerah dan retribusi daerah tertinggi antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta pada setiap tahunnya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di tiap – tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014.
2. Kontribusi Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di tiap – tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014.
3. Bagaimanakah tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh masing – masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian skripsi ini antara lain :

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah .

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Penulis

Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah didapat pada masa pembelajaran di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya, terkhusus pada obyek yang akan diteliti.

b) Bagi masing-masing Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan dalam mempengaruhi pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dalam kurun waktu 2010 – 2014.
- 3) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan di masa yang akan datang.

c) Bagi Pihak Lain

Sebagai bahan masukan serta referensi bagi pihak – pihak yang ingin melaksanakan penelitian di bidang yang sama pada karya ilmiah selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menggunakan sistematika pembahasan dengan susunan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang dihadapi yaitu pengertian dari motivasi, minat, profesi akuntan, pendidikan profesi akuntansi, tinjauan penelitian terdahulu, dan perumusan hipotesis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel, data yang diperlukan, metode pengumpulan data, variabel dan pengukurannya, serta analisis data.

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, hasil penelitian dianalisis berdasarkan teori untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan. Pembahasan pada bab ini meliputi pengujian dan penghitungan analisis deskriptif responden, penghitungan variabel penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, implikasi dari hasil penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan alasan teoritik atas penelitian yang dilakukan guna mengetahui Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerahantar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembahasan yang akan diuraikan pada bab ini yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kontribusi. Bab kajian teoritik ini memiliki keterkaitan dengan bab lainnya, dimana pada bab kajian teoritik ini digunakan sebagai landasan teori dalam analisa bab empat untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada.

2.1. LANDASAN TEORI

2.1.1. Pajak Daerah

a) Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu elemen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Mardiasmo (2008), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (Suandy, 2005).

Menurut Mardiasmo (2002) fungsi pajak daerah menurut pemungutannya terdiri dari dua macam yaitu: Fungsi pendanaan (*budgeter*) pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan fungsi mengatur (*reguler*) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Davey (1998), terdapat 4 (empat) kriteria pajak daerah, yaitu :

- 1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan dari daerah sendiri.
- 2) Pajak yang dipungut berdasar peraturan Pemerintah Pusat dan penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Pajak yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah.

- 4) Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah tetapi hasil pungutannya diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Dari pengertian tersebut diatas, dapat kita ambil beberapaprinsip yang dimiliki oleh pajak daerah yaitu :sifat iuran adalah wajib, tidak memperoleh imbalan langsung yang berimbang, bersifat memaksa, dan sebagai sumber pembiayaan.

b) Dasar Hukum Pajak Daerah

Peraturan perundang-undangan mengenai pajak daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang Pajak Daerah antara lain:

- 1) UU No. 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
- 2) UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4) UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

c) Jenis Pajak Daerah

Menurut Waluyo dan Ilyas (2002), pengelompokan pajak didasarkan atas sifat atau ciri tertentu pada setiap pajak, sehingga dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Pembagian berdasarkan golongan: pajak langsung, pajak tidak langsung.
- 2) Pembagian berdasarkan sifatnya : pajak subyektif, pajak obyektif.
- 3) Pembagian berdasarkan pemungutannya : pajak pusat, pajak daerah.

Pengelompokkan pajak diatur dalam UU No.34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia tentang pajak daerah dan retribusi daerah (Pasal 2 ayat 1 dan 2) serta Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 tentang obyek, subyek, dasar pengenaan pajak dan ketentuan tarif dari pajak daerah yang berlaku, baik sebelum maupun sesudah berlakunya UU No.34 Tahun 2000.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009, pajak daerah dirincimenjadi:

- 1) Pajak Provinsi, terdiri atas: Tarif pajak untuk Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok ditetapkan seragam di seluruh Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2) Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir,

Pajak Air Tanah, Pajak SarangBurung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Jenis pajak daerah menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

d) Objek dan Tarif Pajak Daerah

Tabel 2.1.

JENIS PAJAK		TARIF TERTINGGI
Pajak Daerah Tingkat I		
1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air	Kepemilikan 1	2%
	Kepemilikan 2	10%
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	Penyerahan 1	20%
	Penyerahan 2	1%
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		10%
4. Pajak Air Permukaan		10%
5. Pajak Rokok		10%
Pajak Daerah Tingkat II		
1. Pajak Hotel		10%

2. Pajak Restoran		10%
3. Pajak Hiburan		35%
4. Pajak Reklame		25%
5. Pajak Penerangan Jalan		10%
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		25%
7. Pajak Parkir		30%
8. Pajak Air Tanah		20%
9. Pajak Sarang Burung Walet		10%
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan		0,3%
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		5%

Sumber: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Penetapan tarif pajak paling tinggi mempunyai tujuan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat dari penetapan tarif yang terlalu membebani masyarakat, sedangkan tarif paling rendah tidak ditetapkan untuk memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur sendiri besarnya tarif yang sesuai dengan kondisi masyarakat di daerahnya, termasuk membebaskan pajak bagi masyarakat yang tidak mampu.

2.1.2 Retribusi Daerah

a) Pengertian Retribusi Daerah

Sumber pendapatan asli daerah meliputi retribusi atau perizinan yang diperbolehkan dalam undang-undang. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Saragih, 2003).

Retribusi daerah dalam Undang-Undang PDRD adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam pemungutan retribusi juga memperhatikan objek dan subjek retribusi seperti halnya pungutan pajak daerah (Waluyo, 2011).

Menurut UU No.34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, yang dimaksud retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang/badan. Berdasarkan undang-undang ini, retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Ketiga jenis retribusi tersebut untuk daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing

daerah sebagaimana diatur dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan organisasi. Berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, retribusi dapat disebut sebagai pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

b) Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan mengenai retribusi daerah mengalami beberapa kali perubahan. Peraturan perundangan di bidang retribusi daerah antara lain:

- 1). UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2). UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3). UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

c) Jenis Pemungutan Retribusi Daerah

Prakosa (2005), mengungkapkan bahwa perbedaan utama retribusi dari pajak adalah pada retribusi terdapat kontra-prestasi langsung. Hal tersebut berarti pihak pembayar retribusi melakukan pembayaran karena ditujukan untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah misalnya untuk mendapatkan ijin atas usaha tertentu. Pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan organisasi.

Dengan demikian unsur pemaksaan pada retribusi lebih didasarkan pada hal-hal ekonomis, sedangkan pajak daerah adalah tanpa imbalan langsung yang seimbang kepada wajib pajak. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi, retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus disetorkan pada kas negara atau daerah. Jenis retribusi jasa usaha untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. Jasa retribusi daerah terdiri dari :

1. Jasa Umum

Retribusi jasa umum yang dikenakan atas jasa umum yang digolongkan sebagai retribusi jasa umum sebagai objek atas

retribusi jasa umum ini yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan bermanfaat umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, yaitu: retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan danatau penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Jenis retribusi umum dimaksud dapat tidak dipungut bila ternyata potensi penerimaannya kecil atau atas kebijakan nasional atau daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-cuma. Kriteria retribusi jasa umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a sebagai berikut:

- a) Retribusi jasa umum yang bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.

- b) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c) Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
- f) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

2. Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha ini dikenakan atas jasa usaha sebagai objek retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- a) Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

- b) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Kategori jasa usaha dalam hal ini adalah retribusi pemakaman kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelanggan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan, pesanggrahan atau villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
- b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Mardiasmo, 2008).

Sebagai objek retribusi perizinan tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau pribadi yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu ini meliputi: retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin perikanan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18 ayat 3 huruf c, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

- a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

- b) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. (Siahaan, 2005). Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Berdasarkan Undang - Undang No.33 Tahun 2004, tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 ayat (1), maka sumber – sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- 4) Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.1.4 Kontribusi

Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. (Handoko, 2013). Analisis Kontribusi Pajak daerah adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Rumus Perhitungan Kontribusi

Analisis Kontribusi Pajak Daerah = $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$

Realisasi PAD

Analisis Kontribusi Retribusi Daerah = $\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$

Realisasi PAD

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Wibowo (2006) yang meneliti mengenai “Analisis Kontribusi, efisiensi dan efektivitas Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap PAD di Kabupaten Sragen. Hasil penelitiannya dari analisis kontribusi diketahui bahwa PPJ 2002-2005 terhadap PAD sangat kecil yaitu mencapai antara 10%-20%, sedangkan tingkat efisiensi dan efektivitas masih belum sesuai dengan yang diharapkan.

Iswara (2008) dalam penelitian Analisis Kontribusi Efektivitas dan Efisiensi Pemungutan Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Yogyakarta. Hasil penelitiannya diketahui bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota Yogyakarta 2002-2006 mengalami penurunan dan tingkat efektivitas pajak reklame 2002-2005 sangat efektif sedangkan tingkat efisiensi penerimaan pajak reklame juga sangat efisien. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman yang menyoroti mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mugiwiwowo (2006) dan Iswara (2008).

Irsandy dkk. (2014) dalam penelitian mereka tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu. Hasil penelitiannya diketahui bahwa pada tahun 2010 secara keseluruhan memiliki tingkat efektivitas pajak terendah yang hanya mencapai 69,30 %, sedangkan pada tahun 2012 merupakan tahun dimana tingkat efektivitas Pajak Daerah adalah yang tertinggi, yaitu sebesar 136,67%. Dari hasil analisis kontribusi yang telah dilakukan tampak bahwa tahun 2009 memiliki tingkat kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang terkecil, yaitu sebesar 45,21% dan pada tahun 2012 memiliki tingkat kontribusi yang terbesar, yaitu sebesar 72,66%.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini maka peneliti tertarik untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada objek pajak

daerah dan retribusi daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan data yang digunakan untuk 5 tahun, mulai tahun 2010 sampai tahun 2014.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek atau subjek yang memiliki kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Dewi, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerbitkan laporan keuangan secara konsisten dari tahun 2010 – 2014.
- 2) Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki data lengkap laporan keuangan yang dibutuhkan di dalam penelitian ini.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 – 2014. Sumber data untuk penelitian ini adalah laporan keuangan yang diperoleh dari di

masing – masing Kabupaten/Kota yang tercatat sebagai instansi dan birokrat lokal yang bertanggung jawab langsung atas pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah di tiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang akan digunakan dalam proses perhitungan ini merupakan data kuantitatif, yaitu data dari laporan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, serta Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan studi literatur atau studi kepustakaan dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah buku, jurnal, literatur, dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dengan tujuan untuk mendapatkan landasan teoritis dalam melakukan analisis dan sekaligus merupakan pedoman dalam studi dan penelitian di lapangan. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data diperlukan untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran permasalahan dari objek yang diteliti, pengertian dari teknik pengumpulan data adalah “teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data”. (Sugiyono, 2011)

3.4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu analisis data secara deskriptif. Metode ini merupakan teknik analisis yang dipakai untuk

menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data – data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Analisis statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, diagram, grafik, tabel maupun persentase.



BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Umum

Pada umumnya, setiap Pemerintah Daerah mempunyai Organisasi Perangkat Daerah yang mengurus tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Organisasi tersebut dibentuk berdasarkan pada Peraturan masing – masing Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, terdapat perbedaan nama dan fungsi organisasi dari masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1) DPPKAD Kabupaten Bantul

1.1 Profil DPPKAD Kabupaten Bantul

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 tahun 2011 tentang Perubahan Ke-Tiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul

tertanggal 29 Desember 2011. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah DPPKAD yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah, maka nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diubah atau diganti menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pada awal dibentuknya organisasi perangkat daerah DPPKAD yaitu tahun 2009 yang merupakan gabungan tiga organisasi perangkat daerah yaitu:

1. Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada bidang pendapatan daerah.
2. Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang pengelolaan keuangan daerah.
3. Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam pengelolaan aset/kekayaan daerah.

1.2 Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Bantul

a. Visi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki visi:

“Terpercaya & handal dalam tata kelola keuangan dan kekayaan daerah, terbaik se Indonesia.”

b. Misi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki misi:

- 1) *Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif.*
- 2) *Mewujudkan manajemen keuangan dan asset daerah yang semakin berkualitas.*
- 3) *Pemantapan organisasi berbasis manusia yang unggul dalam moral, terampil dan memahami medan kerja.*

1.3 Tugas dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Bantul

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

Fungsi yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Tujuan dan Sasaran DPPKAD Kabupaten Bantul

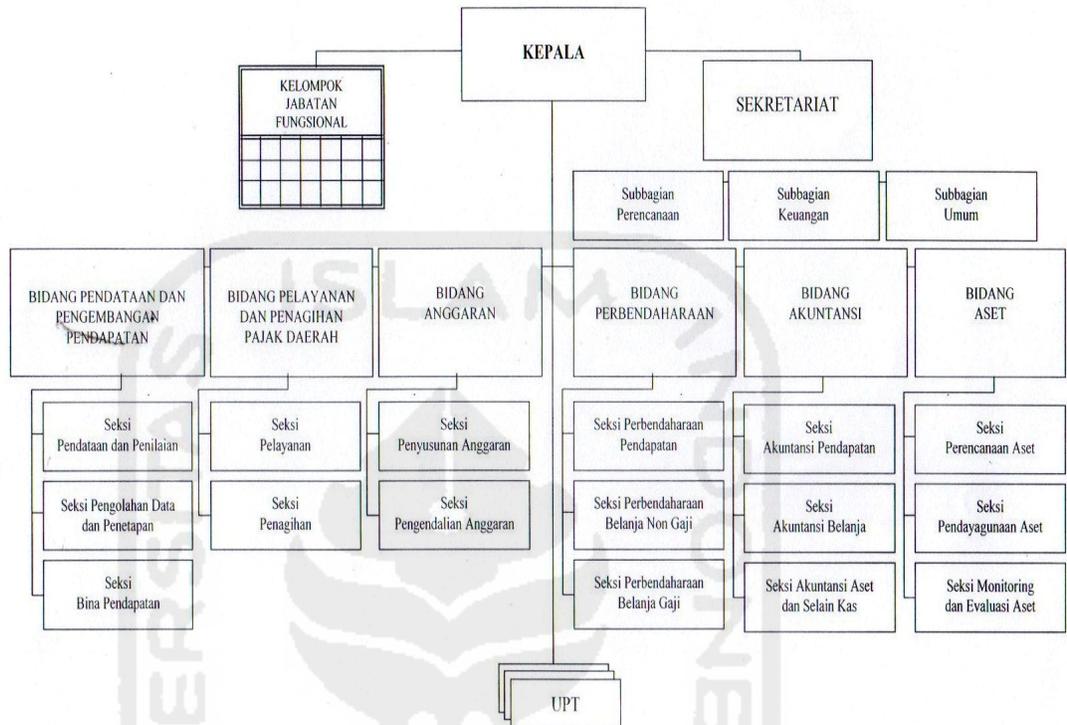
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Terlaksananya optimaalisasi sumber – sumber pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah.
2. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Terwujudnya peningkatan sistem penganggaran yang efisien, efektif ekonomis dan tepat sasaran.
4. Terwujudnya paenatausahaan keuangan yang akuntabel, transparan, professional dan bertanggungjawab.
5. Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang tranparan, akuntabel, fungsional, kepastian hukum, kepastian nilai, efisien, dan efektif.
6. Terwujudnya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.
7. Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi dan informasi.
8. Terwujudnya sistem kerja yang profesional dengan didukung oleh sarana prasarana dan SDM yang berkualitas.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul juga mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas pembiayaan pembangunan daerah.
2. Mengupayakan terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan aset daerah berkualitas.
3. Meningkatnya efektivitas APBD.
4. Meningkatnya profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas penata usahaan keuangan daerah.
5. Mewujudkan pengelolaan dan penata usahaan aset daerah yang komprehensif.
6. Mewujudkan peningkatan kualitas penilaian atas laporan keuangan daerah.
7. Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terintegrasi.
8. Meningkatnya efisiensi, efektivitas dan responsibilitas pelayanan publik.

1.5 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Bantul



Gambar 4.1

2) DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

2.1 Profil DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gunungkidul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas – Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas – Dinas Daerah. Sedangkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2.2 Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

a. Visi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki visi:

“Menuju pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang akuntabel dan profesional.”

b. Misi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul memiliki misi:

- 1. Mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.*

2. *Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.*
3. *Mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat serta dapat dipertanggungjawabkan.*

2.3 Tugas dan Fungsi DPPKAD Kabupaten Gunungkidul

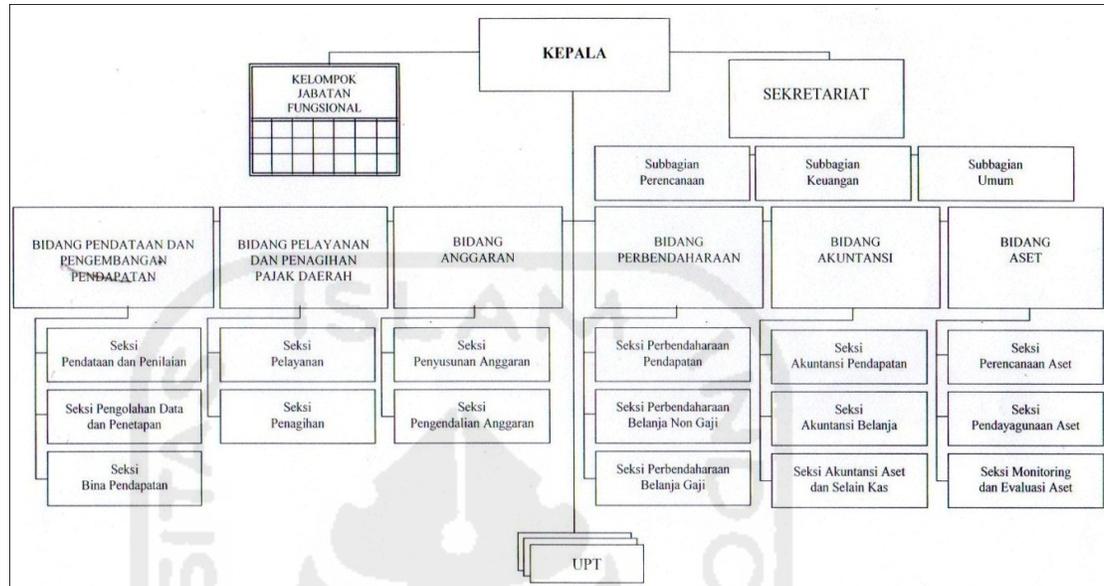
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dibebankan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan umum dibidang pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah.
2. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah.
3. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah.
4. Pelaksanaan dan pembinaan pemungutan pajak daerah.
5. Pembinaan pendapatan daerah.

6. Pengelolaan penerimaan dana perimbangan dan lain – lain pendapatan.
7. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
8. Penyusunan rancangan pertanggungjawaban APBD.
9. Pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan keuangan daerah.
10. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah.
11. Penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
12. Pelaksanaan dan pembinaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.
13. Pengelolaan barang milik daerah.
14. Pengesahan DPA-SKPD, DPPA-SKPD, DPA-SKPKD, dan DPPA-SKPKD.
15. Pelaksanaan pengendalian pelaksanaan APBD.
16. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan aset.
17. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
18. Pengelolaan UPT dan Kesekretariatan Dinas.

2.4 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Gunungkidul



Gambar 4.2

3. DPPKA Kabupaten Kulonprogo

3.1 Profil DPPKAD Kabupaten Kulonprogo

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban dan hak yang seimbang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan amanah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi ketugasan bagi seorang pemimpin/kepala daerah yang selanjutnya dilakukan pembagian tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan pembagian tugas ini diharapkan peran dan fungsi dapat dilaksanakan dengan

efektif sehingga pemberian pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat diberikan dengan baik sesuai dengan keadaannya guna menuju kesejahteraan masyarakat seperti yang diharapkan.

Salah satu ketugasan Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan adalah melakukan perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada sisi pengelolaan pendapatan daerah dituntut untuk dapat dikelola dengan optimal, tertata, tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terwujud pendapatan yang optimal serta dapat mewujudkan kemampuan keuangan yang lebih besar serta adanya perhatian pada prioritas sisi belanja dan pembiayaan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat luas sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada.

3.2 Dasar Hukum DPPKAD Kabupaten Kulonprogo

Sebagai dasar hukum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kulon Progo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- d. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- g. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2010 tentang BPHTB .
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016.
- m. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pada Unsur Organisasi Terendah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- n. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pemerintah Daerah.

3.4 Visi dan Misi DPPKAD Kabupaten Kulonprogo

a. Visi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulonprogomemiliki visi:

“Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Profesional”.

Penjelasan dari visi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan prima dimaksudkan bahwa semua aparatur yang terlibat mulai dari unsur pimpinan hingga pelaksana harus dapat memberikan kepuasan terbaik dan bermanfaat kepada semua pihak terkait dengan cara yang ramah dan santun dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan Keuangan adalah proses yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan meliputi aspek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Profesional, yang dimaksudkan adalah terbentuknya SDM yang memiliki integritas, kemampuan dan penguasaan akan tugasannya sehingga mampu menemukan permasalahan dan mencari alternatif pemecahannya serta kreativitas pengembangan dengan didasari rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi.

b. Misi

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kulonprogo memiliki misi:

“Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Melalui Akuntabilitas Keuangan Daerah”

Dengan adanya visi dan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat lebih mengetahui peran ketugasan dan program-program serta hasil yang akan diperoleh di masa akan datang.

3.5 Tujuan dan Sasaran DPPKA Kabupaten Kulonprogo

Tujuan adalah merupakan suatu langkah yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Adapun tujuan yang akan dicapai adalah terwujudnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan melalui akuntabilitas keuangan daerah.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan adalah meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

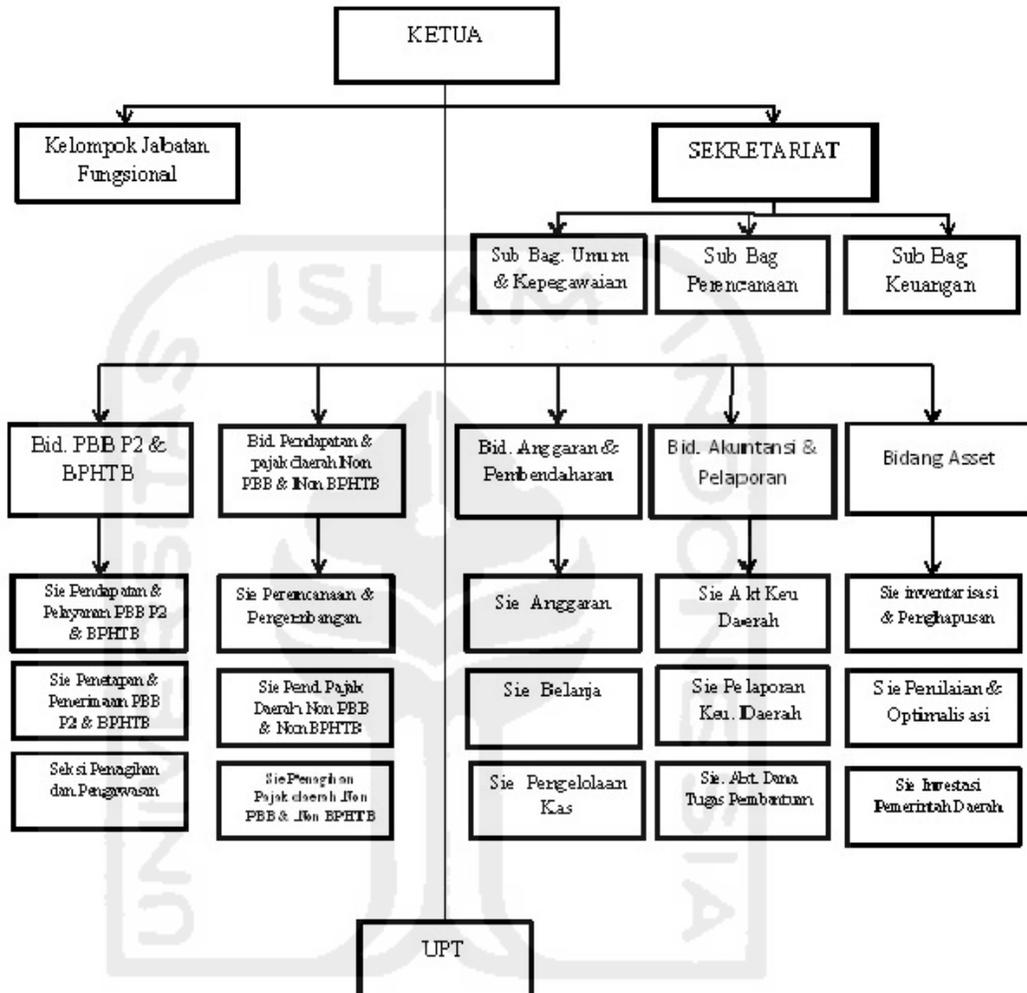
3.6 Tugas dan Fungsi DPPKA Kabupaten Kulonprogo

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulonprogo mempunyai tugas dalam melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah Kabupaten Kulonprogo dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Bagian Kesatu Pasal 59, disebutkan bahwa “Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset. Untuk melaksanakan fungsi tersebut maka dalam pasal 59 disebutkan bahwa DPPKA Kabupaten Kulon Progo mempunyai tugas :

- a. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- b. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di Bidang Pendapatan dan Pajak Daerah Non Pajak bumi dan Bangunan dan Non Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
- c. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.
- d. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- e. Merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengawasan di Bidang Aset.
- f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

3.7 Struktur Organisasi DPPKAD Kabupaten Kulonprogo



Gambar 4.3

4. Dispenda Kabupaten Sleman

4.1 Profil DISPENDA Kabupaten Sleman

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sleman sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman.

4.2 Kedudukan dan Tugas Pokok Dispenda Kabupaten Sleman

a. Kedudukan

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sleman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas ini mempunyai tugas dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah.

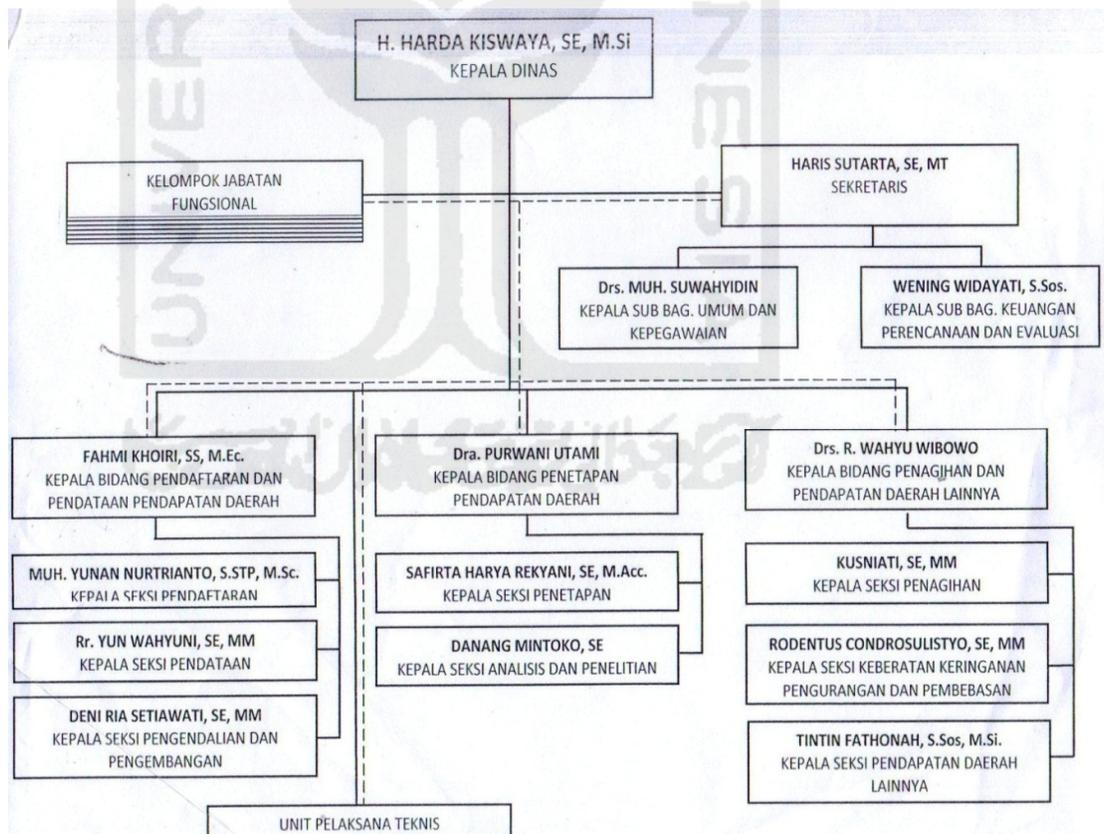
b. Tugas Pokok

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sleman mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah. tugas tersebut

yaitu sebagai berikut : Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah.

- a. Pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah.
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pendapatan daerah.
- c. Pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3 Struktur Organisasi Dispenda Kabupaten Sleman



Gambar 4.4

5. DPDPK Kota Yogyakarta

5.1 Profil DPDPK Kota Yogyakarta

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) Kota Yogyakarta sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas – Dinas Daerah maka terbentuklah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta yang merupakan penggabungan dari 2 (dua) instansi yaitu Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta dan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta.

5.2 Visi dan Misi DPDPK Kota Yogyakarta

a. Visi

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta memiliki visi:

“Menjadi fasilitator dan motivator pengelolaan pajak daerah dan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas.”

b. Misi

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta memiliki misi:

1. *Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah.*
2. *Mewujudkan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.*

5.3 Kedudukan & Tugas Pokok DPDPK Kota Yogyakarta

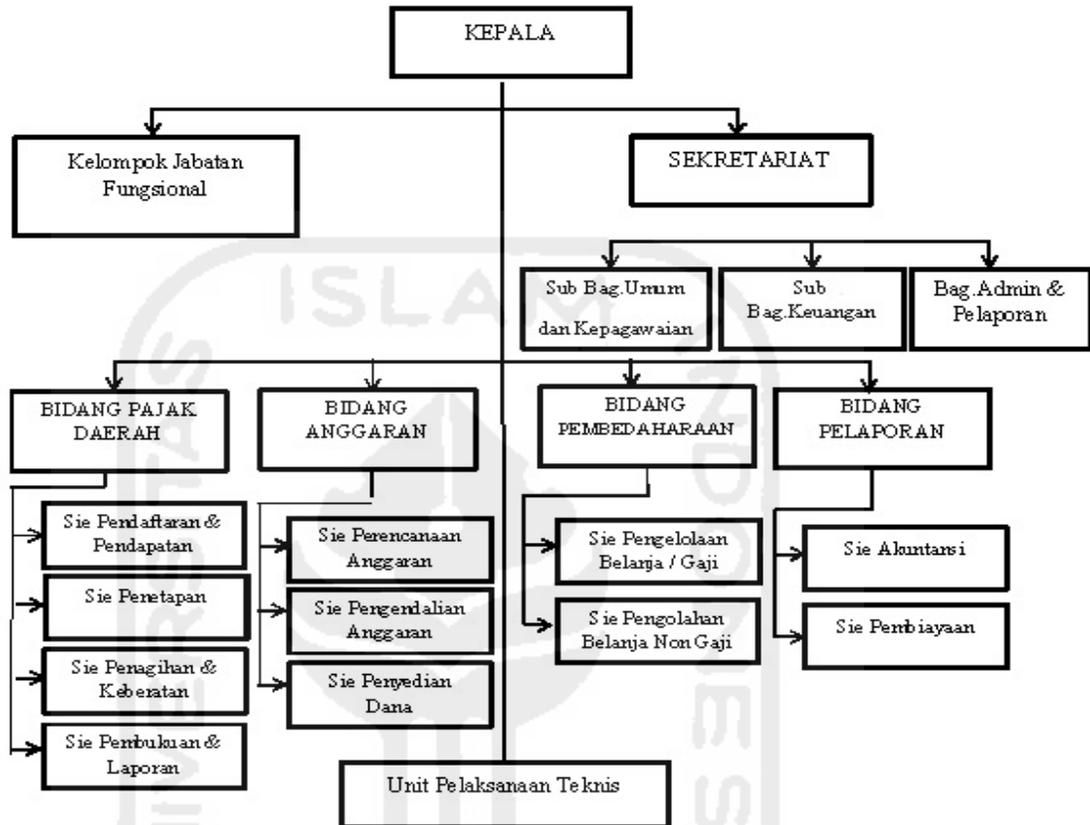
a. Kedudukan

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Yogyakarta. Dinas ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pajak daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

5.4 Struktur Organisasi DPDPK Kota Yogyakarta



Gambar 4.5

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Deskriptif

Metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu analisis data secara deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan. Metode ini merupakan teknik analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data – data yang sudah dikumpulkan seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Analisis statistik deskriptif merupakan suatu metode dalam mengorganisir dan menganalisis data kuantitatif, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu kegiatan diantaranya seperti penyajian data kedalam bentuk grafik, tabel, diagram, grafik, tabel maupun persentase.

Data dibawah ini digunakan untuk mengetahui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 – 2014. Data Pajak dan Retribusi Daerah antar Kabupaten/Kota, ini disajikan dalam tampilan 5 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Berikut adalah pembahasan dari hasil analisis deskriptif antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

a. Kabupaten Bantul

Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Bantul pada tahun 2010 - 2014. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 5 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui berapa persentase kontribusi masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul. Mengingat laporan realisasi anggaran ini disajikan dalam 5 besar pendapatan tertinggi pada setiap tahunnya, pada 1 jenis pemasukan pajak daerah dan retribusi daerah tidak akan selalu ditampilkan selama 5 tahun pada laporan tersebut. Berikut ini akan disertakan tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul tahun 2010 – 2014 :

Tabel 4.1

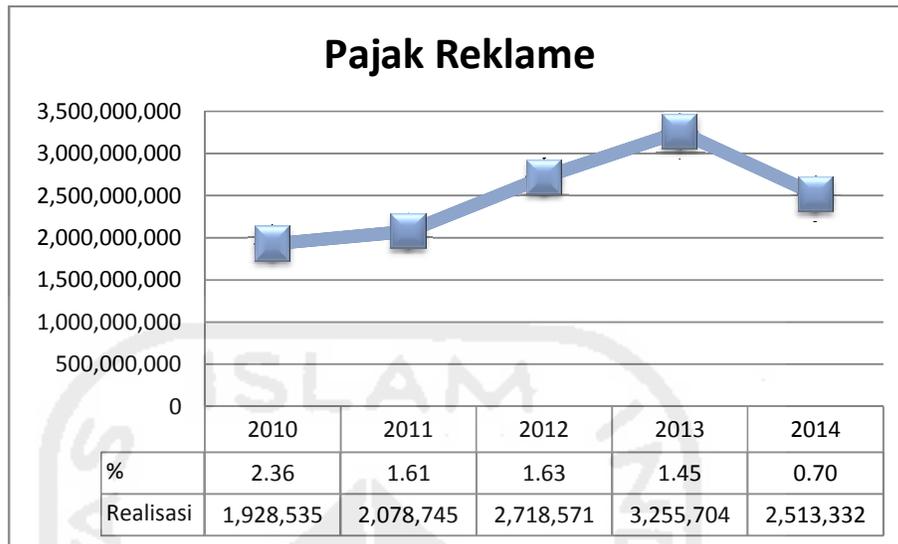
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Asli Daerah		
PAD Bantul 2010	89,015,027,965	81,637,099,293
PAD Bantul 2011	115,321,898,744	128,896,456,173
PAD Bantul 2012	141,624,239,103	166,597,778,029
PAD Bantul 2013	205,407,209,787	224,197,864,331
PAD Bantul 2014	288,038,728,992	357,411,062,723

1. Laporan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Bantul



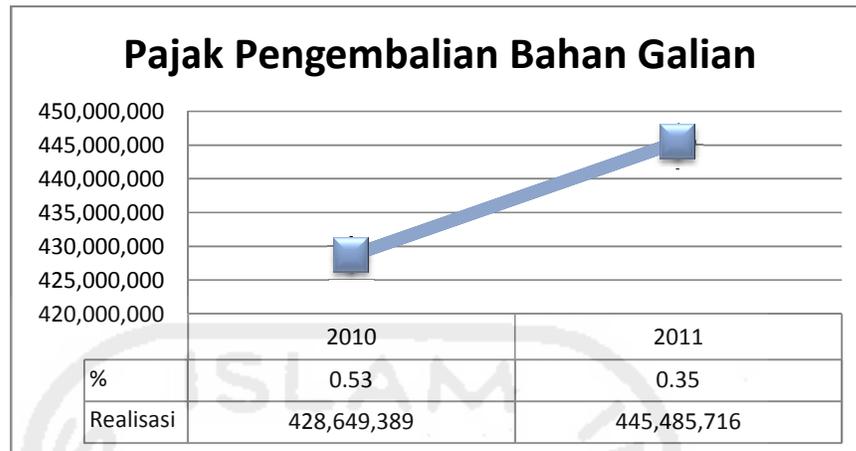
Gambar 4.6

Menurut gambar diatas, pendapatan pajak penerangan jalan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan persentase kontribusi pajak penerangan jalan Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1), sehingga terlihat pada tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 16.57% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 6,49%.



Gambar 4.7

Berdasarkan gambar diatas, pendapatan pajak reklame menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2013 dan mengalami penurunan pada tahun 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan persentase kontribusi pajak reklame Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak reklame setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1), sehingga terlihat pada tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 2,36% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,70%.



Gambar 4.8

Menurut analisis pada gambar diatas, pendapatan pajak pengembalian bahan galian menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 dan 2011. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan persentase kontribusi pajak pengembalian bahan galian Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak pengembalian bahan galian setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1), sehingga terlihat pada tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0.53% dan tahun 2011 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,35%.



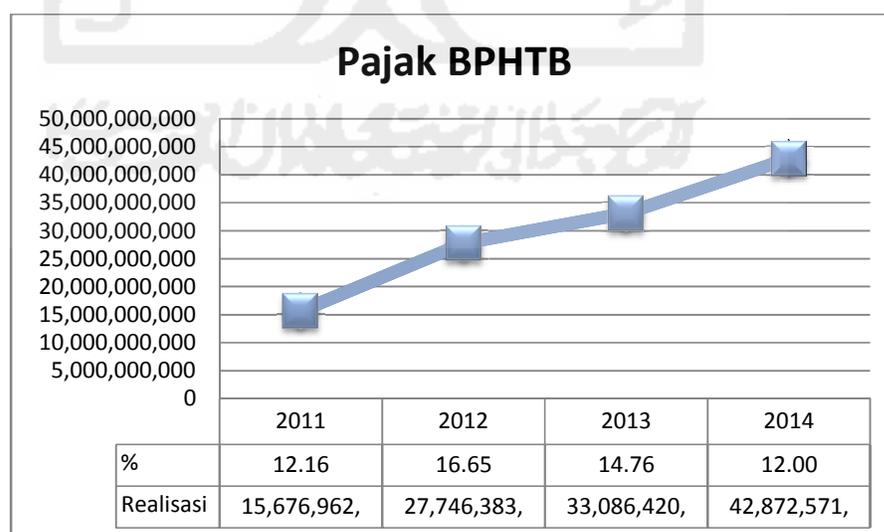
Gambar 4.9

Menurut analisis pada gambar diatas, pendapatan pajak restoran menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 - 2014. Pada grafik diatas menunjukkan pada tahun 2010 – 2012 mengalami peningkatan persentase kontribusi pajak restoran, namun pada tahun 2013 -2014 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak restoran setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 1,71% dan tahun 2010 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,48%.



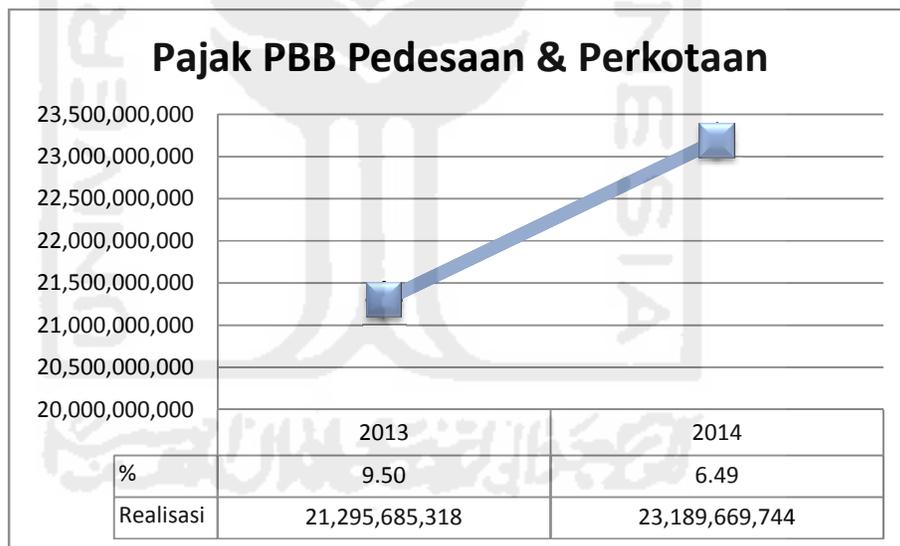
Gambar 4.10

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.10, pendapatan pajak hiburan pada tahun 2010 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 149,914,202 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 0,18%.



Gambar 4.11

Menurut analisis pada gambar 4.11, pendapatan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2011 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun 2011– 2012 mengalami peningkatan persentase kontribusi pajak BPHTB, namun pada tahun 2013 -2014 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak BPHTB setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 1,71% dan tahun 2010 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,48%.

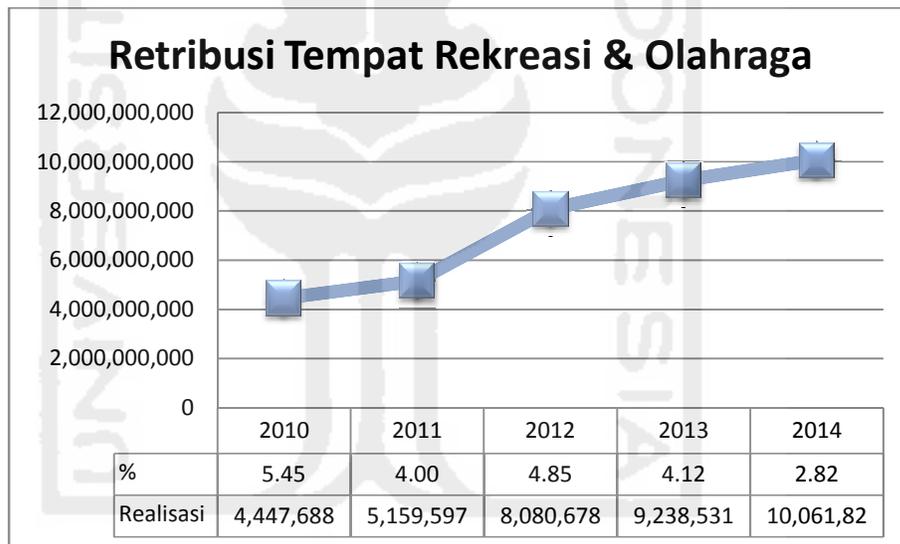


Gambar 4.12

Menurut analisis pada gambar 4.12, pendapatan Pajak PBB Pedesaan & Perkotaan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2013 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun tersebut mengalami penurunan persentase kontribusi Pajak PBB Pedesaan & Perkotaan. Hal ini

disebabkan realisasi pendapatan Pajak PBB Pedesaan & Perkotaan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1), sehingga dapat disimpulkan tahun 2013 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 9,50% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 6,49%.

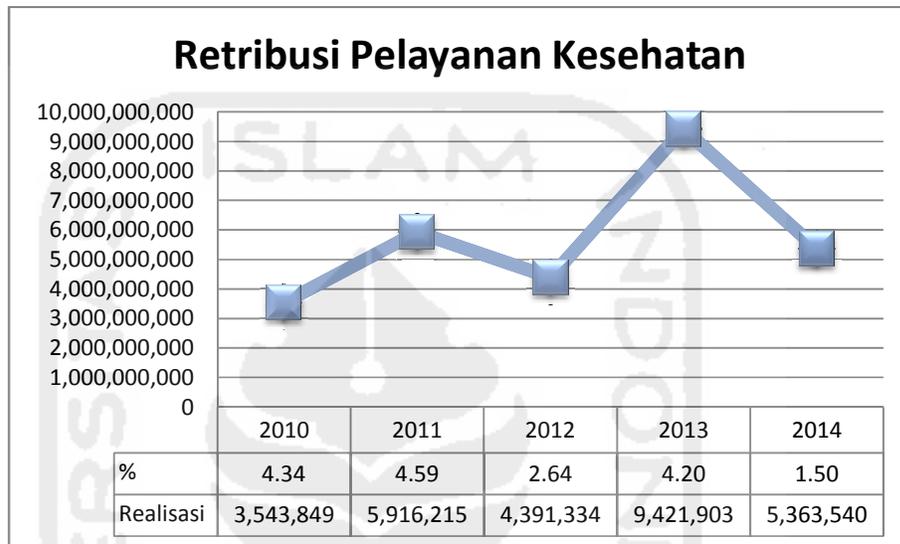
2. Laporan Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul



Gambar 4.13

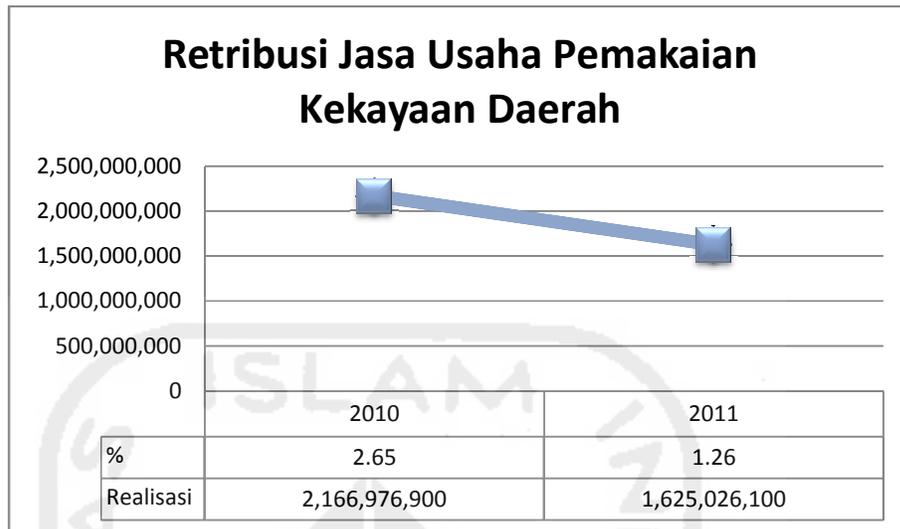
Menurut analisis pada gambar 4.13, pendapatan retribusi tempat rekreasi & olahraga menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan tidak stabilnya pertumbuhan persentase kontribusi retribusi tempat rekreasi & olahraga pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi & olahraga setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1),

sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 5,45% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 2,82%



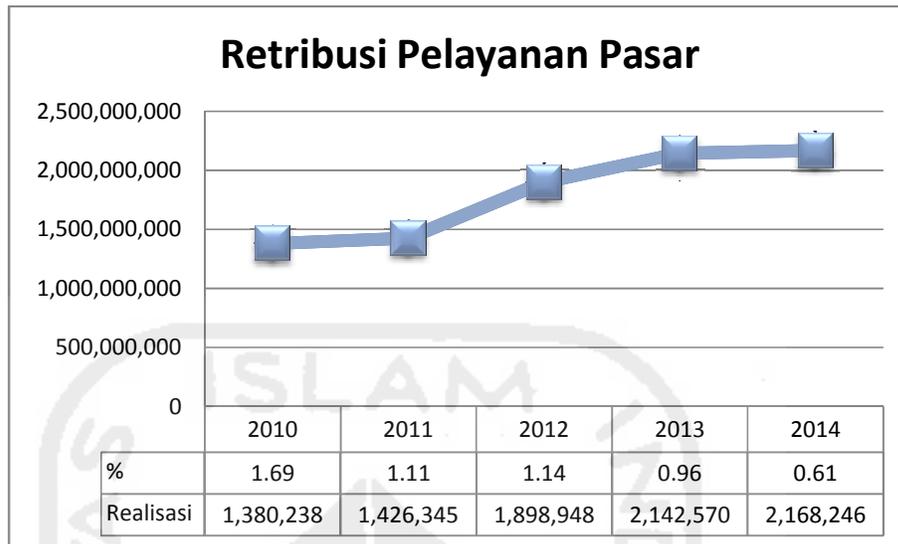
Gambar 4.14

Berdasarkan analisis pada gambar 4.14, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan ketidakstabilan pertumbuhan persentase kontribusi retribusi pelayanan kesehatan pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pelayanan kesehatan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1), sehingga dapat disimpulkan tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 4,59% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 1,50%.



Gambar 4.15

Berdasarkan analisis pada gambar diatas, pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah menunjukkan penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2010 & 2011. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan persentase kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pemakaian kekayaan daerah setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 2,65% dan tahun 2011 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 1,26%.



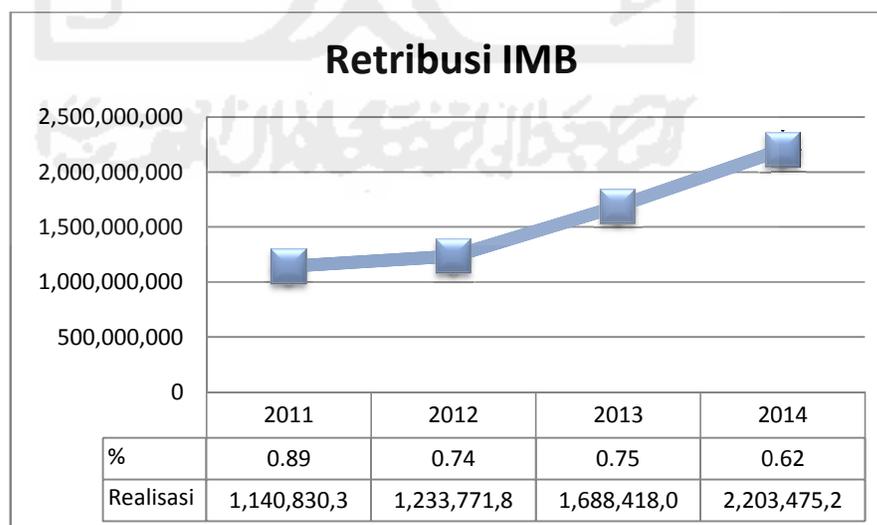
Gambar 4.16

Berdasarkan analisis pada gambar 4.16, pendapatan retribusi pelayanan pasar menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun tersebut mengalami penurunan persentase kontribusi retribusi pelayanan pasar pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pelayanan pasar setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 1,69% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,61%.



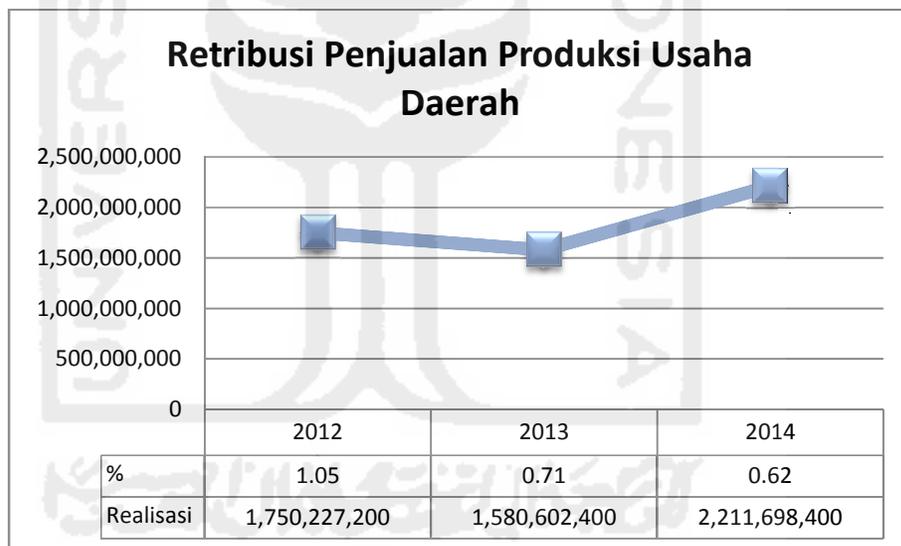
Gambar 4.17

Berdasarkan analisis data yang terdapat pada gambar 4.10, pendapatan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah pada tahun 2010 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 149,914,202 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 0,18%.



Gambar 4.18

Berdasarkan analisis pada gambar 4.18, pendapatan retribusi IMB menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2011 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan ketidakstabilan pertumbuhan persentase kontribusi retribusi IMB pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi IMB setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,89% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,62%.



Gambar 4.19

Menurut analisis pada gambar 4.19, pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah menunjukkan penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2013. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun 2011 – 2013 mengalami penurunan persentase kontribusi retribusi penjualan produksi usaha daerah. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah setiap

tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Bantul (lihat tabel 4.1), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 1,05% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,62%.



b. Kabupaten Gunungkidul

Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2010-2014. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 5 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui berapa persentase kontribusi masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gunungkidul. Mengingat laporan realisasi anggaran ini disajikan dalam 5 besar pendapatan tertinggi pada setiap tahunnya, pada 1 jenis pemasukan pajak daerah dan retribusi daerah tidak akan selalu ditampilkan selama 5 tahun pada laporan tersebut. Berikut ini akan disertakan tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 – 2014 :

Tabel 4.2

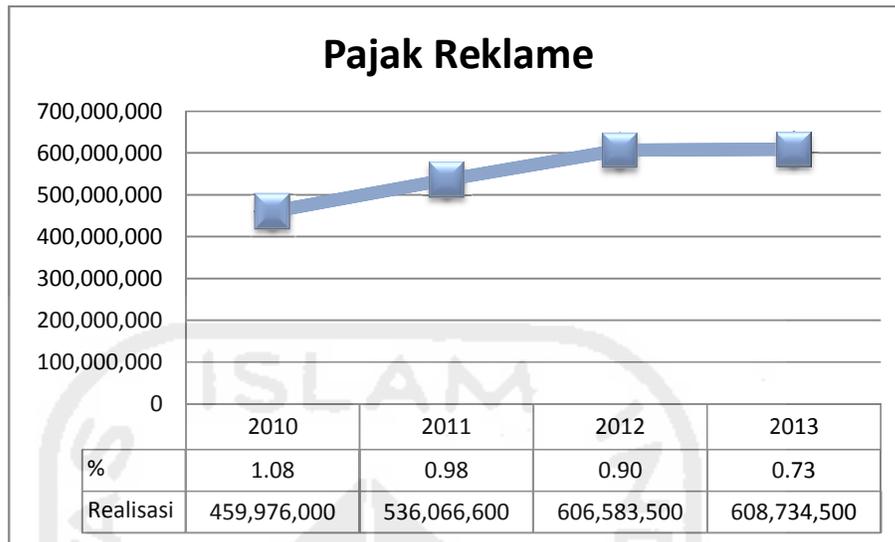
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Asli Daerah		
PAD Gunungkidul 2010	40,963,061,130	42,542,031,389
PAD Gunungkidul 2011	47,953,224,512	54,462,418,772
PAD Gunungkidul 2012	68,065,973,303	67,050,781,893
PAD Gunungkidul 2013	76,674,187,127	83,427,447,822
PAD Gunungkidul 2014	144,367,217,445	159,304,338,202

1. Laporan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul



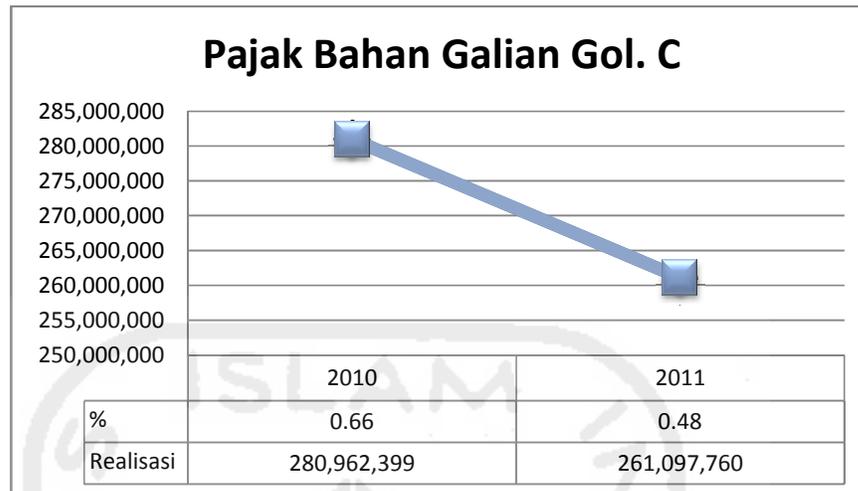
Gambar 4.20

Menurut analisis pada gambar 4.20, pendapatan pajak penerangan jalan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun 2011 mengalami peningkatan persentase kontribusi, lalu mengalami penurunan kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Gunungkidul (lihat tabel 4.2), sehingga dapat disimpulkan tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 12,04% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 8,17%.



Gambar 4.21

Menurut analisis pada gambar 4.21, pendapatan pajak reklame menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2013. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun 2011 sampai tahun 2013 mengalami penurunan persentase kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajakreklame setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Gunungkidul (lihat tabel 4.2), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 1,08% dan tahun 2013 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,73%.



Gambar 4.22

Menurut analisis pada gambar 4.22, pendapatan pajak bahan galian gol.C menunjukkan penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2011. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun 2010 sampai tahun 2011 mengalami penurunan persentase kontribusi pajak bahan galian gol.C terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak bahan galian gol.C setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Gunungkidul (lihat tabel 4.2), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,66% dan tahun 2011 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,48%.



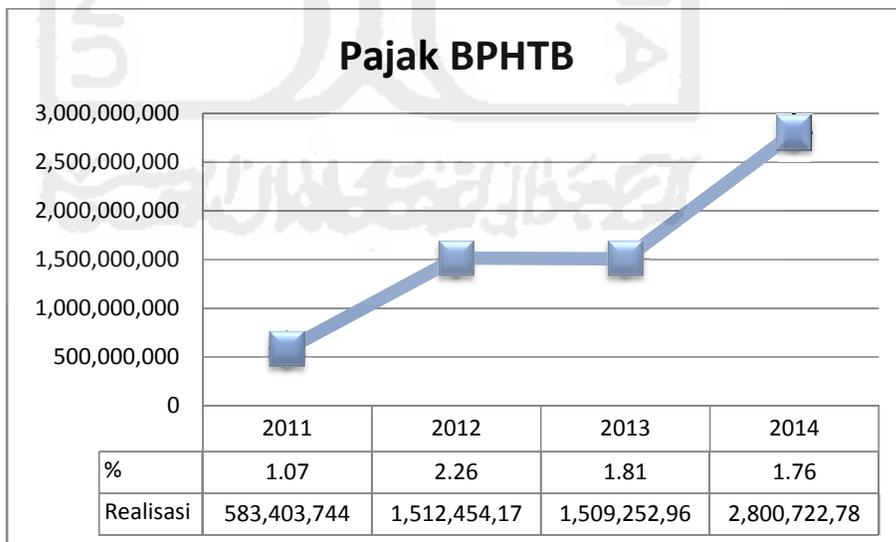
Gambar 4.23

Menurut analisis pada gambar 4.23, pendapatan pajak restoran menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun 2010 sampai tahun 2013 mengalami peningkatan persentase dan pada tahun 2014 mengalami penurunan kontribusi pajak restoran terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak restoran setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Gunungkidul (lihat tabel 4.2), sehingga dapat disimpulkan tahun 2013 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 1,61% dan tahun 2010 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,15%.



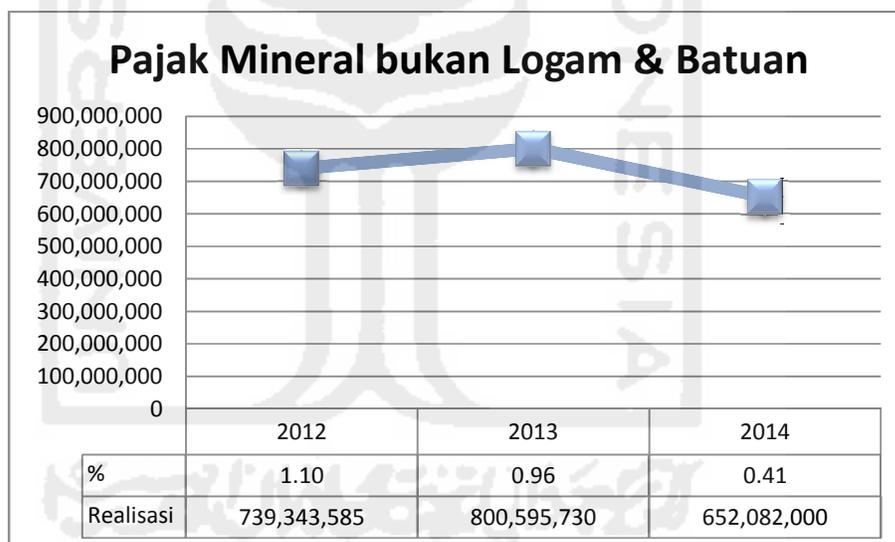
Gambar 4.24

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.24, pendapatan pajak hotel pada tahun 2010 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 15,310,000 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 0,18%.



Gambar 4.25

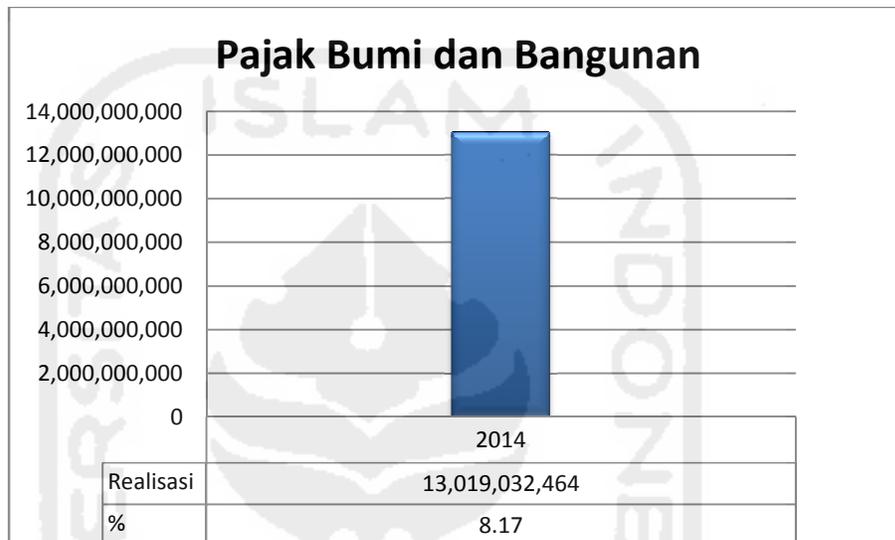
Berdasarkan analisis pada gambar 4.25, pendapatan pajak BPHTB menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2011 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan ketidakstabilan pertumbuhan persentase kontribusi pajak BPHTB pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak BPHTB setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Gunungkidul (lihat tabel 4.2), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 2,26% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 1,07%.



Gambar 4.26

Berdasarkan analisis pada gambar 4.26, pendapatan Pajak Mineral bukan Logam & Batuan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2012 – 2013, lalu mengalami penurunan pada pendapatan tahun 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan persentase kontribusi Pajak Mineral bukan Logam & Batuan pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan

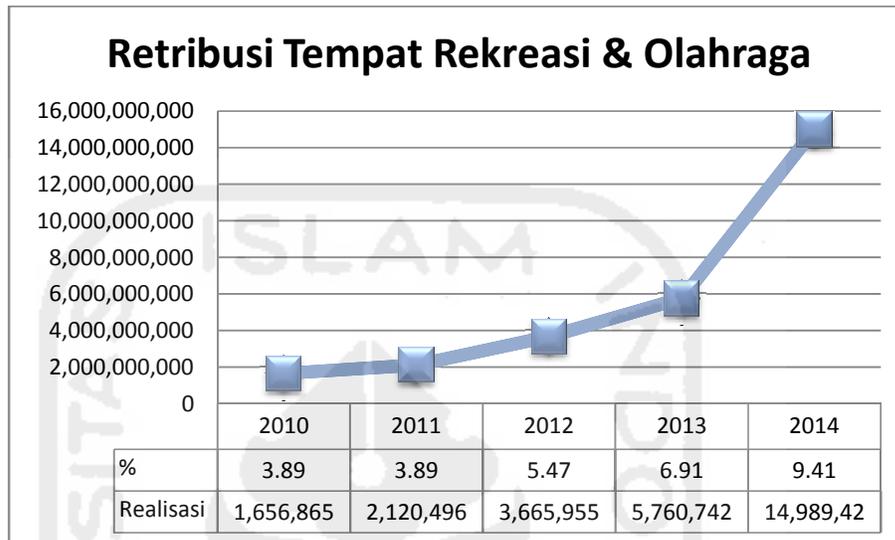
Pajak Mineral bukan Logam & Batuansetiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Gunungkidul (lihat tabel 4.2), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012merupakan kontribusi tertinggi sebesar1,10% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,41%.



Gambar 4.27

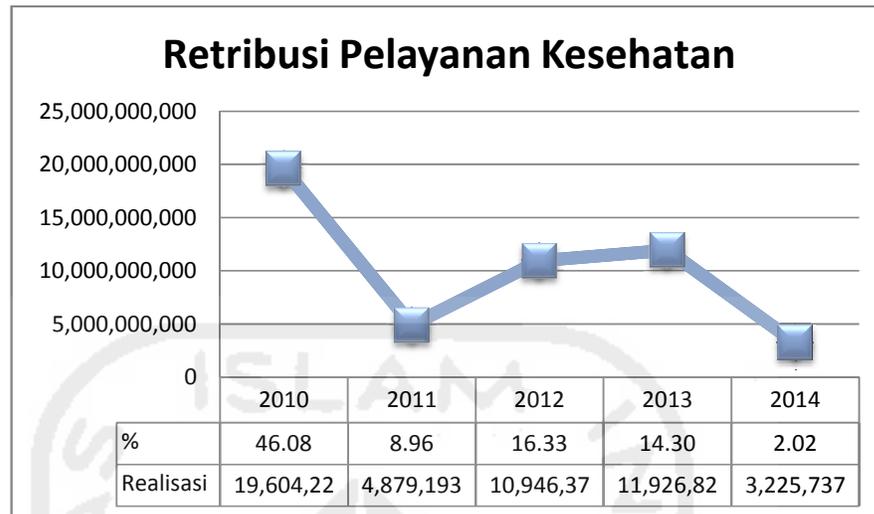
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.27, pendapatan pajak bumi & bangunan pada tahun 2014 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 13,019,032,464 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 8,17%.

2. Laporan Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul



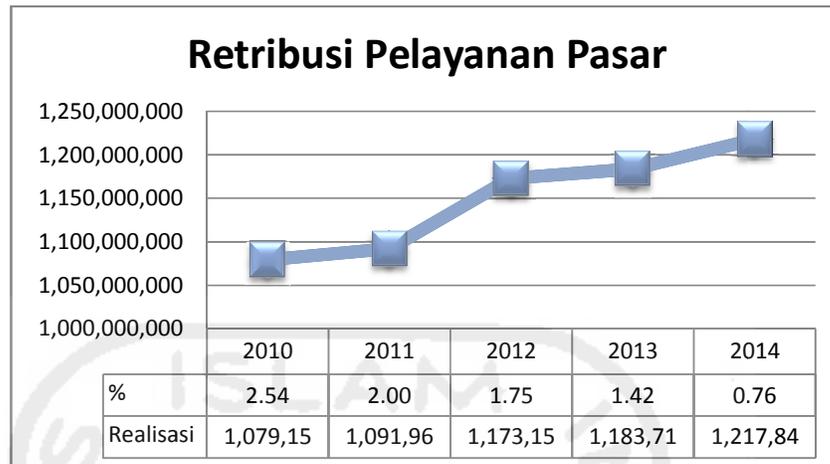
Gambar 4.28

Menurut analisis pada gambar 4.28, pendapatan retribusi tempat rekreasi & olahraga menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan peningkatan persentase kontribusi retribusi tempat rekreasi & olahraga pada PAD Kabupaten Gunungkidul disetiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi & olahraga setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Gunungkidul (lihat tabel 4.2), sehingga dapat disimpulkan tahun 2014 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 9,41% serta tahun 2010 & 2011 merupakan kontribusi yang terkecil sebesar 3,89%.



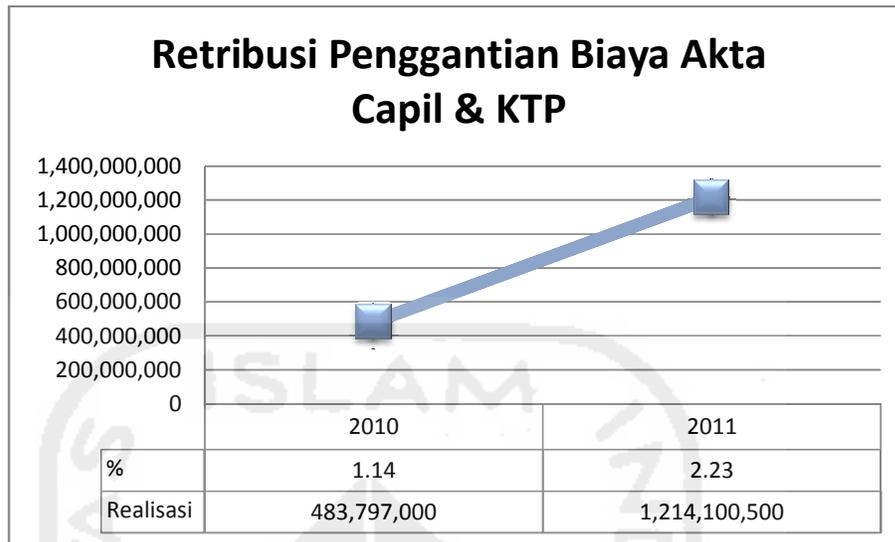
Gambar 4.29

Berdasarkan analisis pada gambar 4.29, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan menunjukkan ketidakstabilan realisasi penerimaan pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan tidak stabilnya pertumbuhan persentase kontribusi retribusi pelayanan kesehatan pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Gunungkidul (lihat tabel 4.2), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 46,08% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 2,02%.



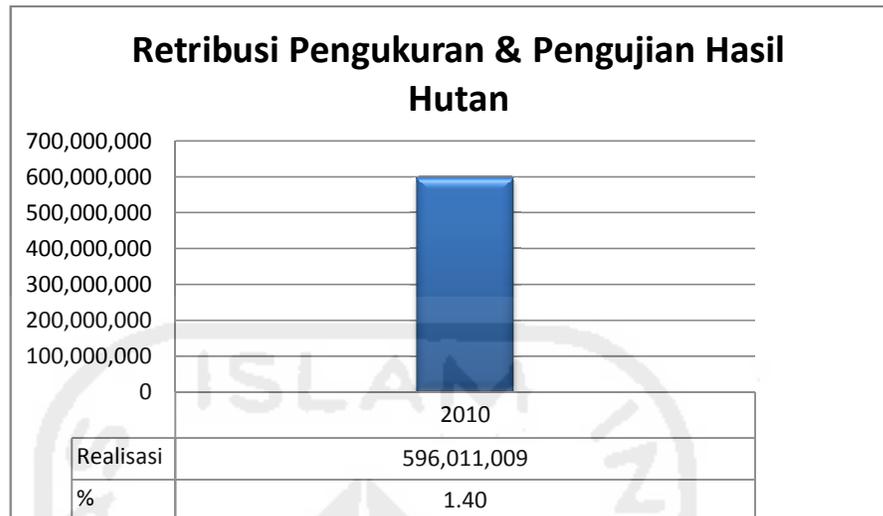
Gambar 4.30

Menurut analisis pada gambar 4.30, pendapatan retribusi pelayanan pasar menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun 2011 mengalami penurunan persentase kontribusi retribusi pelayanan pasar pada PAD Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Gunungkidul (lihat tabel 4.2), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 2,54% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,76 %.



Gambar 4.31

Menurut analisis pada gambar 4.31, pendapatan retribusi penggantian biaya akta capil & ktp menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2011. Pada grafik diatas juga menunjukkan mengalami peningkatan persentase kontribusi retribusi penggantian biaya akta capil & ktp pada PAD Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi penggantian biaya akta capil & ktp setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Gunungkidul (lihat tabel 4.2), sehingga dapat disimpulkan tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 2,23% dan tahun 2010 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 1,14%.



Gambar 4.32

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.32, pendapatan retribusi pengukuran & pengujian hasil hutan pada tahun 2010 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 596,011,009 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 1,40% terhadap PAD Gunungkidul.



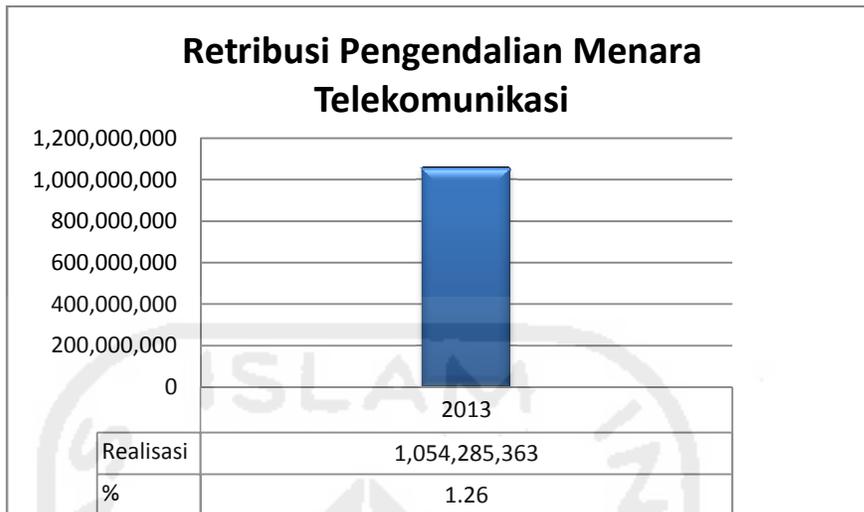
Gambar 4.33

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.33, pendapatan retribusi pengukuran & pengujian hasil hutan pada tahun 2010 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 357,598,175 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 0,66 % terhadap PAD Gunungkidul.



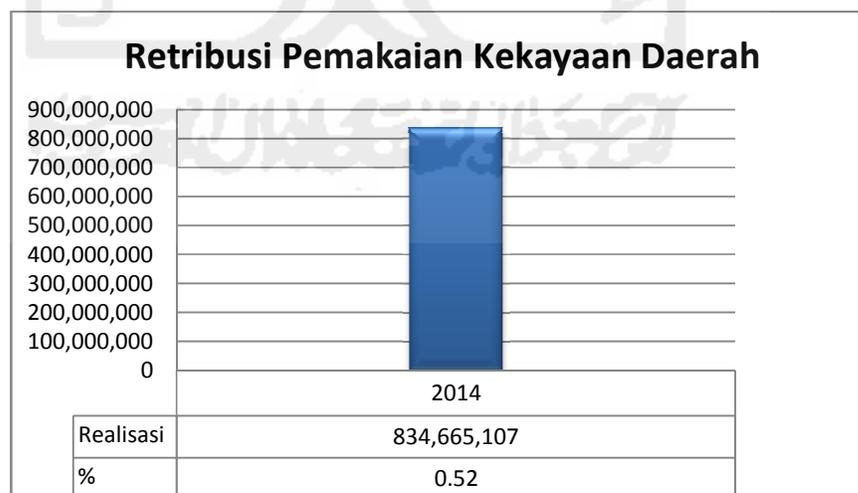
Gambar 4.34

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.34, pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah pada tahun 2012 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 745,185,000 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 1,11 % terhadap PAD Gunungkidul.



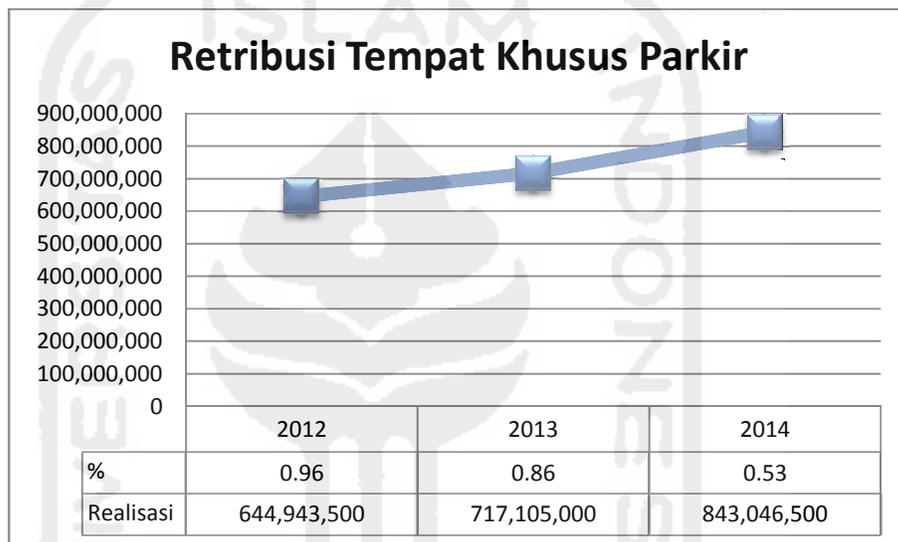
Gambar 4.35

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.35, pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada tahun 2013 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 1,054,285,363 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 1,26 % terhadap PAD Gunungkidul.



Gambar 4.36

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.36, pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2014 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 834,665,107 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 0,52 % terhadap PAD Gunungkidul.



Gambar 4.37

Menurut analisis pada gambar 4.37, pendapatan retribusi tempat khusus parkir menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2012 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun tersebut mengalami penurunan persentase kontribusi retribusi tempat khusus parkir pada PAD Kabupaten Gunungkidul. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi tempat khusus parkir setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Gunungkidul (lihat tabel 4.2), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,96% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,53 %.

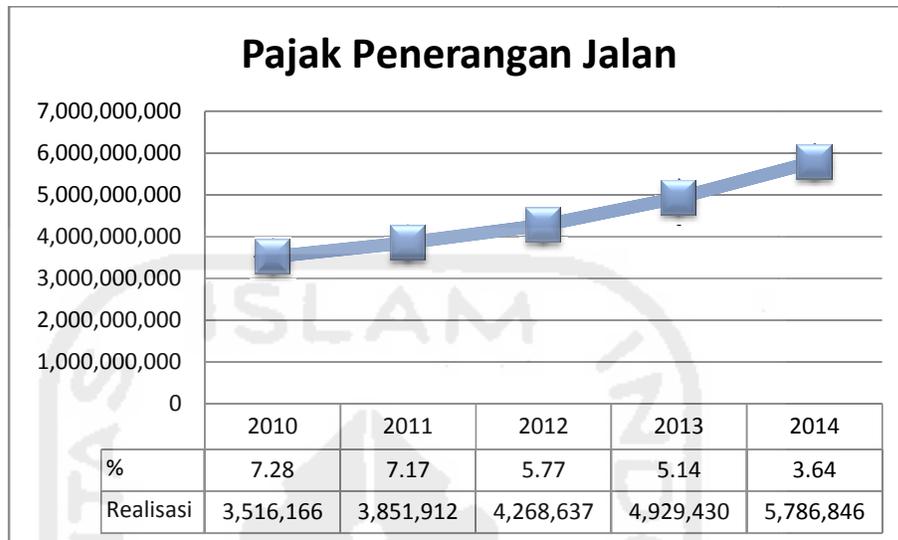
c. Kabupaten Kulonprogo

Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Kulonprogopada tahun 2010-2014. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli DaerahKabupaten Kulonprogo, dengan caradibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 5 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui berapa persentase kontribusi masing-masing pajak daerahdan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulonprogo. Mengingat laporan realisasi anggaran ini disajikan dalam 5 besar pendapatan tertinggi pada setiap tahunnya, pada 1 jenis pemasukan pajak daerah dan retribusi daerah tidak akan selalu ditampilkan selama 5 tahun pada laporan tersebut. Berikut ini akan disertakan tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulonprogo tahun 2010 – 2014 :

Tabel 4.3

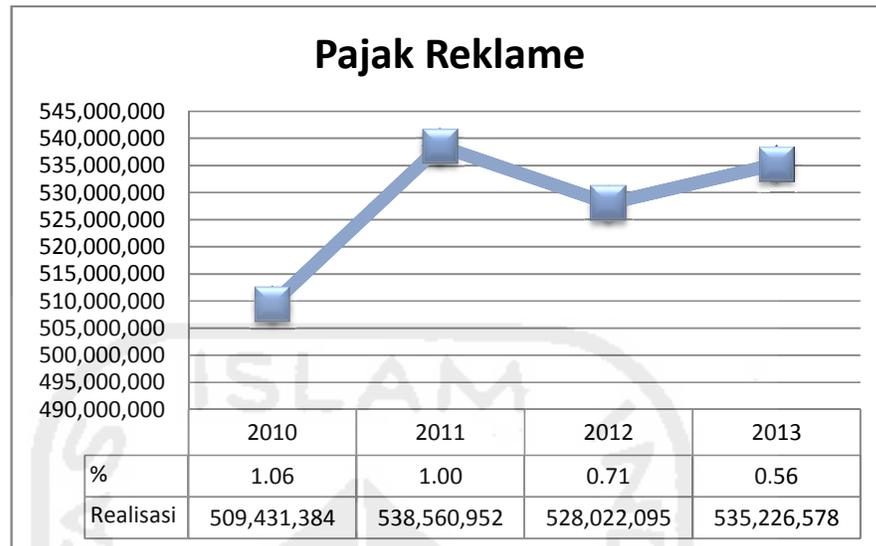
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Asli Daerah		
PAD Kulonprogo 2010	45,501,872,652	48,280,640,675
PAD Kulonprogo 2011	50,913,640,001	53,752,293,432
PAD Kulonprogo 2012	64,998,319,035	74,028,663,155
PAD Kulonprogo 2013	78,430,504,349	95,991,512,851
PAD Kulonprogo 2014	131,892,992,137	158,818,431,853

1. Laporan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Kulonprogo



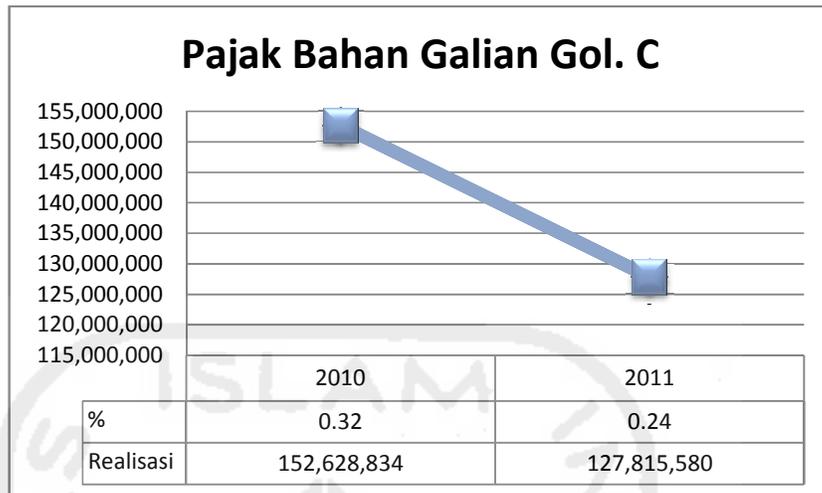
Gambar 4.38

Menurut analisis pada gambar 4.38, pendapatan pajak penerangan jalan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik di atas pada tahun 2010 – 2014 juga menunjukkan penurunan persentase kontribusi pajak penerangan jalan pada PAD Kabupaten Kulonprogo. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 7,28% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 3,64%.



Gambar 4.39

Menurut analisis pada gambar 4.39, pendapatan pajak reklame menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 dan 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun 2010 - 2014 mengalami penurunan persentase kontribusi pajak reklame pada PAD Kabupaten Kulonprogo. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak reklame setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 1,06% dan tahun 2013 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,56%.



Gambar 4.40

Menurut analisis pada gambar 4.40, pendapatan pajak bahan galian golongan C menunjukkan penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2010 dan 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun 2010 & 2014 mengalami penurunan persentase kontribusipajak bahan galian golongan C pada PAD Kabupaten Kulonprogo. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak bahan galian golongan C setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,32% dan tahun 2011 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,24%.



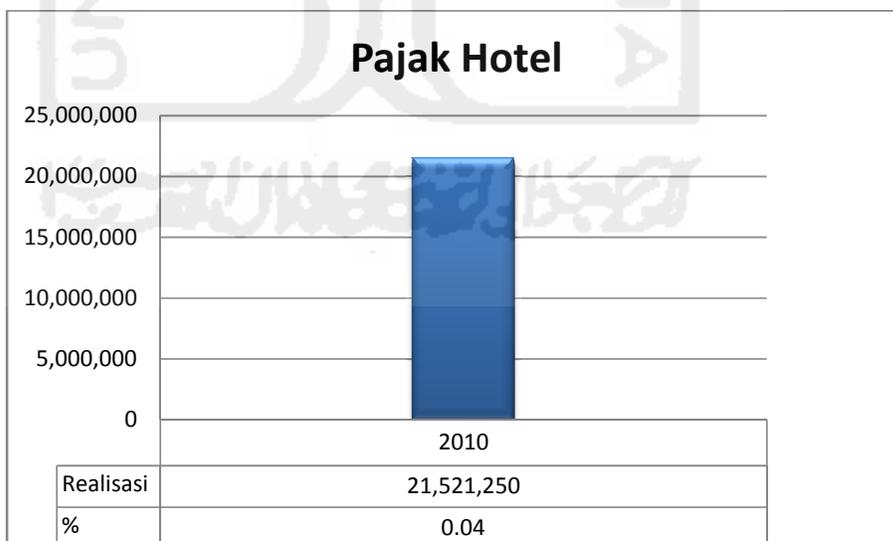
Gambar 4.41

Menurut analisis pada gambar 4.41, pendapatan pajak restoran menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 - 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan belum stabilnya pertumbuhan persentase kontribusi pajak restoran pada PAD Kabupaten Kulonprogo. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak restoran setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2013 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,65% dan tahun 2011 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,20%.



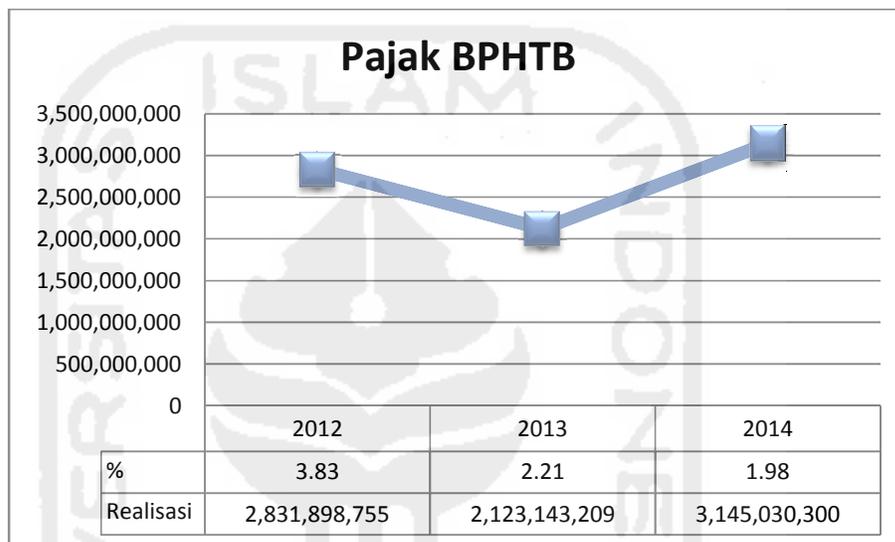
Gambar 4.42

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.42, pendapatan pajak hiburan pada tahun 2010 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 14,921,600 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 0,03 % terhadap PAD Kulonprogo.



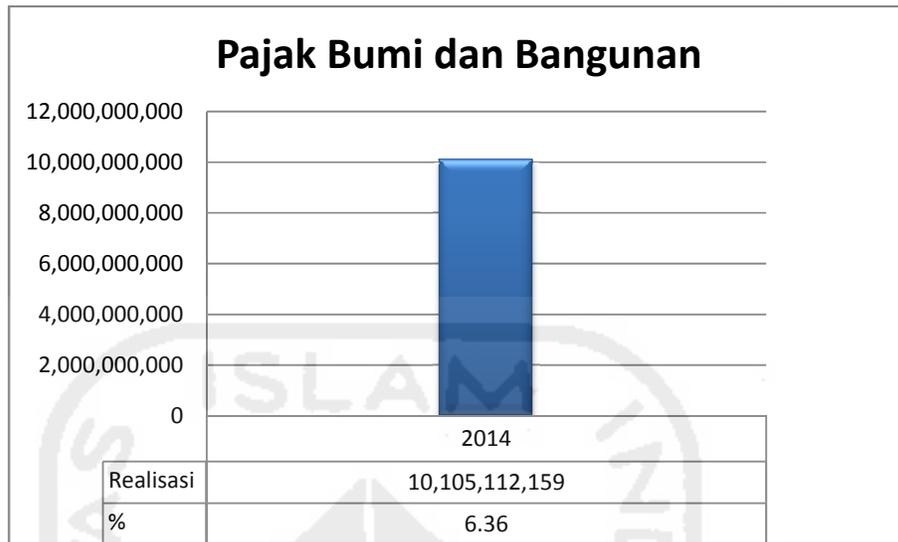
Gambar 4.43

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.42, pendapatan pajak hotel pada tahun 2010 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 21,521,250 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 0,04 % terhadap PAD Kulonprogo.



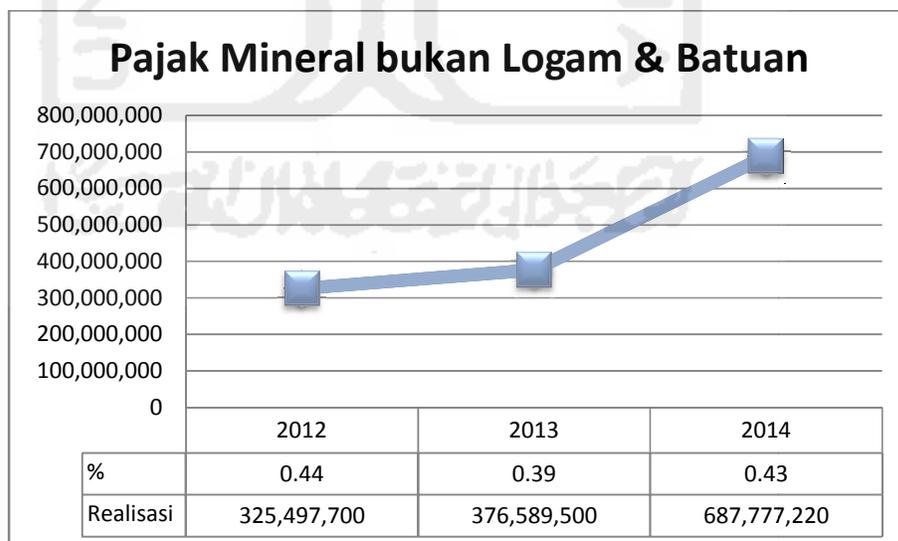
Gambar 4.44

Menurut analisis pada gambar 4.44, pendapatan pajak BPHTB menunjukkan penurunan pendapatan pada tahun 2013 dan mengalami peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan pertumbuhan persentase kontribusi pajak BPHTB pada PAD Kabupaten Kulonprogo. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak BPHTB setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 3,83% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 1,98%.



Gambar 4.45

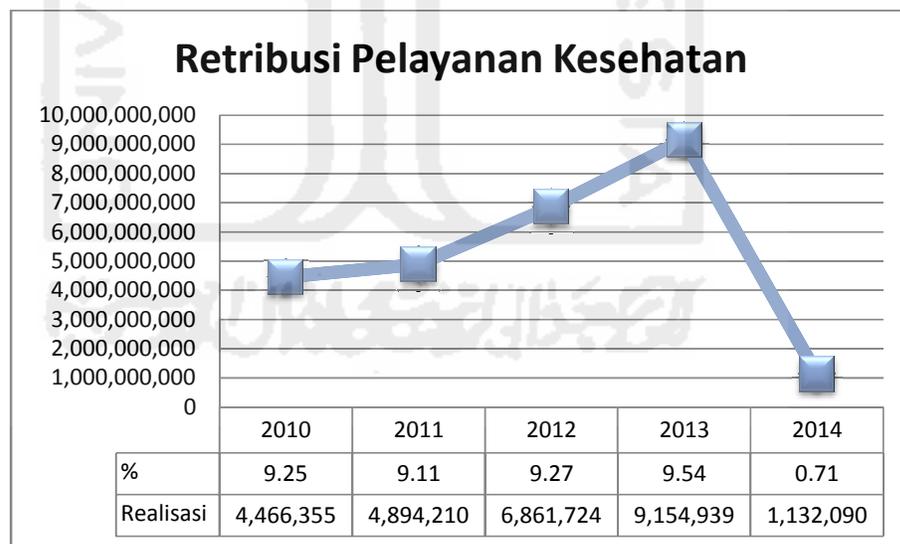
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.45, pendapatan pajak bumi & bangunan pada tahun 2014 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 10,105,112,159 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 6,36 % terhadap PAD Kulonprogo.



Gambar 4.46

Menurut analisis pada gambar 4.46, pendapatan pajak mineral bukan batuan & logam menunjukkan peningkatan pendapatan tahun 2012 - 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan pertumbuhan persentase kontribusi pada pajak mineral bukan batuan & logam pada PAD Kabupaten Kulonprogo tahun 2013, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2014. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak mineral bukan batuan & logam setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,14% dan tahun 2013 merupakan kontribusi terkecil dengan persentase 0,39%.

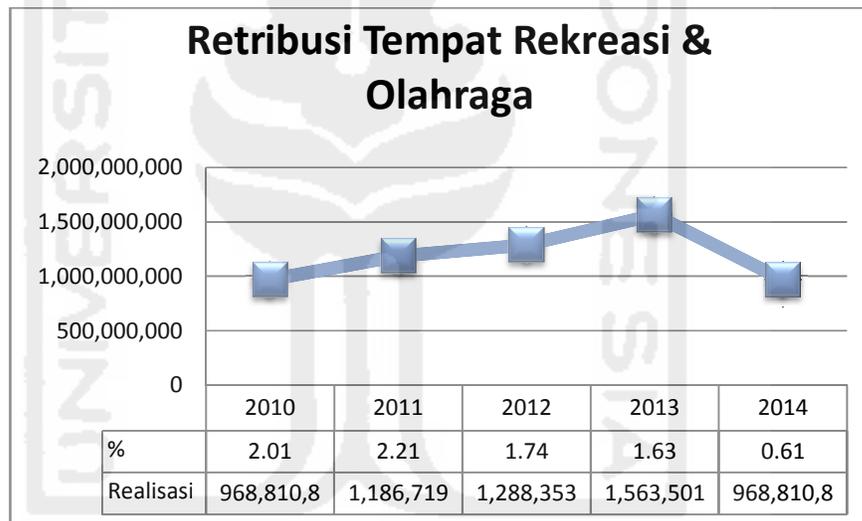
2. Laporan Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Kulonprogo



Gambar 4.47

Menurut analisis pada gambar 4.47, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2013,

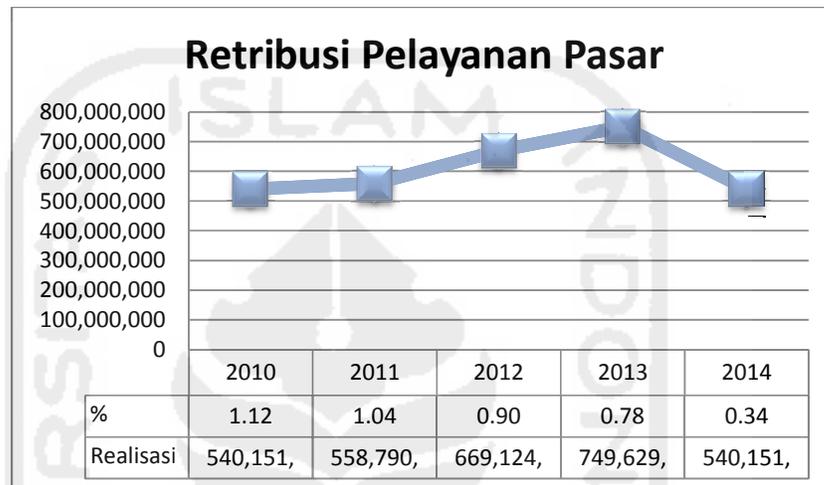
lalu mengalami penurunan pada tahun 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan belum stabilnya pertumbuhan persentase kontribusi retribusi pelayanan kesehatan pada PAD Kabupaten Kulonprogo. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2013 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 9,54% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,71%.



Gambar 4.48

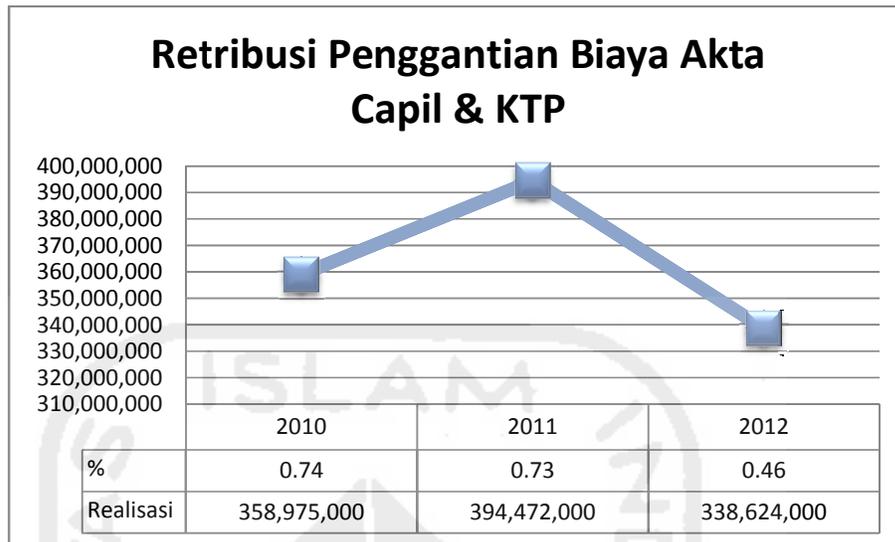
Menurut analisis pada gambar 4.48, pendapatan retribusi tempat rekreasi & olahraga menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2013, lalu mengalami penurunan pada tahun 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan belum stabilnya pertumbuhan persentase kontribusi retribusi tempat rekreasi & olahraga pada PAD Kabupaten Kulonprogo. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi & olahraga setiap tahun yang dibagi dengan

jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 2,21% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,61 %.



Gambar 4.49

Menurut analisis pada gambar 4.49, pendapatan retribusi pelayanan pasar menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2013, lalu mengalami penurunan pada tahun 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan belum stabilnya pertumbuhan persentase kontribusi retribusi pelayanan pasar pada PAD Kabupaten Kulonprogo. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 1,12% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,34%.



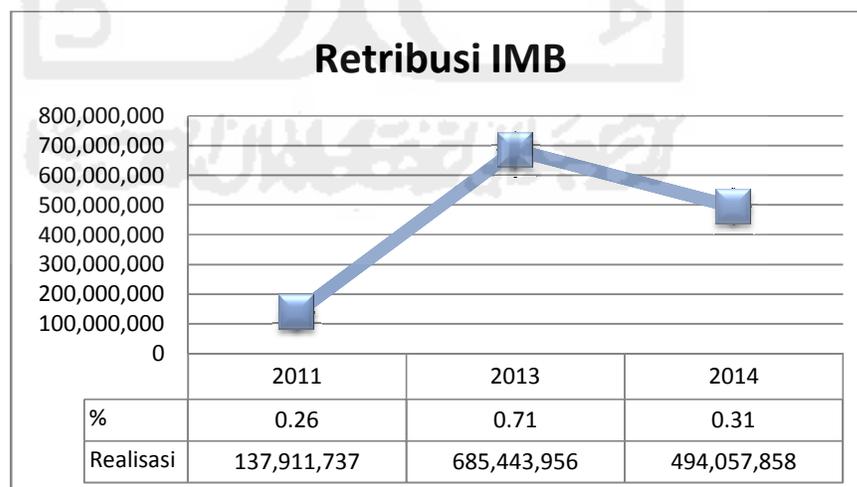
Gambar 4.50

Menurut analisis pada gambar 4.50, pendapatan retribusi penggantian biaya akta capil & ktp menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2011, lalu mengalami penurunan pada tahun 2012. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan persentase kontribusi retribusi penggantian biaya akta capil & ktp pada PAD Kabupaten Kulonprogo. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi penggantian biaya akta capil & ktp setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,74% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,46%.



Gambar 4.51

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.51, pendapatan retribusi penjualan produksi usaha daerah pada tahun 2010 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 450,361,069 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 0,93% terhadap PAD Kulonprogo.



Gambar 4.52

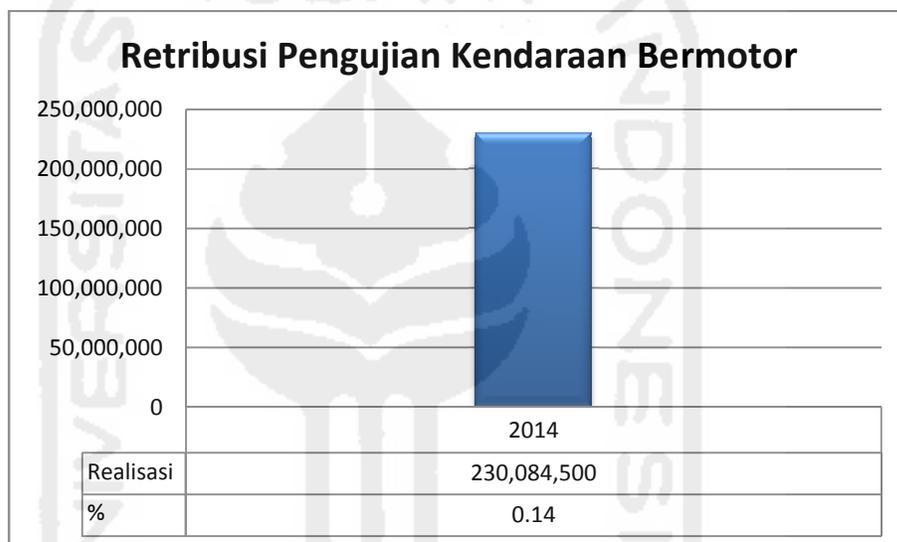
Menurut analisis pada gambar 4.52, pendapatan retribusiIMB menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2013, lalu mengalami penurunan pada tahun 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan belum stabilnya pertumbuhan persentasekontribusi retribusiIMB pada PAD Kabupaten Kulonprogo. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusiIMB setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,71% dan tahun 2011 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,26%.



Gambar 4.53

Menurut analisis pada gambar 4.53, pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2012 – 2013. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan persentase kontribusi retribusi pengendalian menara telekomunikasi pada PAD

Kabupaten Kulonprogo. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Kulonprogo (lihat tabel 4.3), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,81% dan tahun 2013 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,69%.



Gambar 4.54

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.54, pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada tahun 2014 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 230,084,500 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 0,14% terhadap PAD Kulonprogo.

d. Kabupaten Sleman

Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Sleman pada tahun 2010-2014. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 5 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui berapa persentase kontribusi masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sleman. Mengingat laporan realisasi anggaran ini disajikan dalam 5 besar pendapatan tertinggi pada setiap tahunnya, pada 1 jenis pemasukan pajak daerah dan retribusi daerah tidak akan selalu ditampilkan selama 5 tahun pada laporan tersebut. Berikut ini akan disertakan tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman tahun 2010 – 2014 :

Tabel 4.4

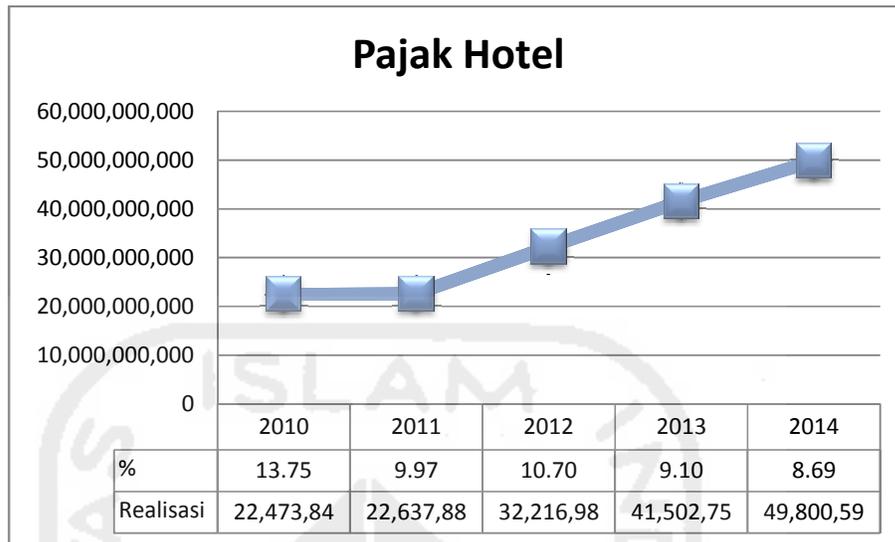
URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Asli Daerah		
PAD Sleman 2010	163,530,209,690	163,442,921,920
PAD Sleman 2011	203,766,407,218	227,108,171,114
PAD Sleman 2012	241,003,081,720	301,069,539,284
PAD Sleman 2013	342,895,307,198	456,026,490,588
PAD Sleman 2014	474,917,917,941	573,343,496,413

1. Laporan Kontribusi Pajak Daerah Kabupaten Sleman



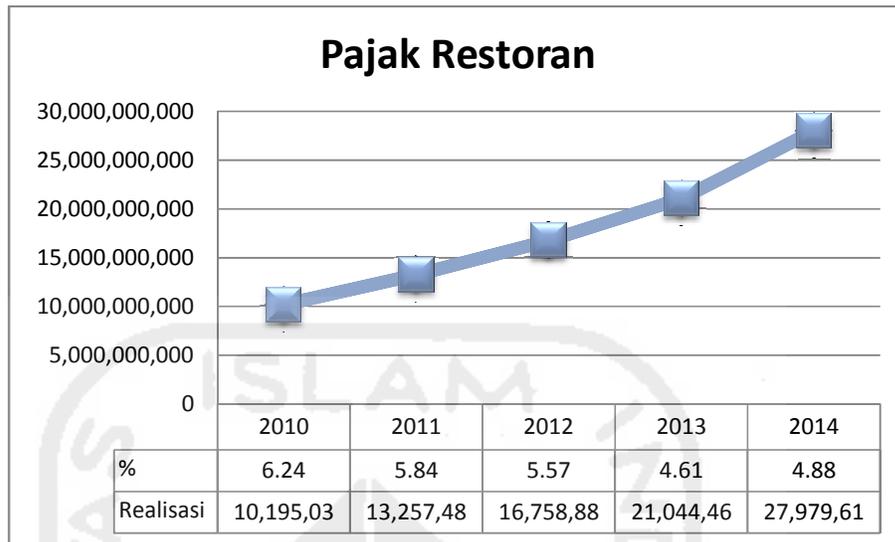
Gambar 4.55

Menurut analisis pada gambar 4.55, pendapatan pajak penerangan jalan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan kontribusi persentase pajak penerangan jalan pada PAD Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 20,57% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 10,49%.



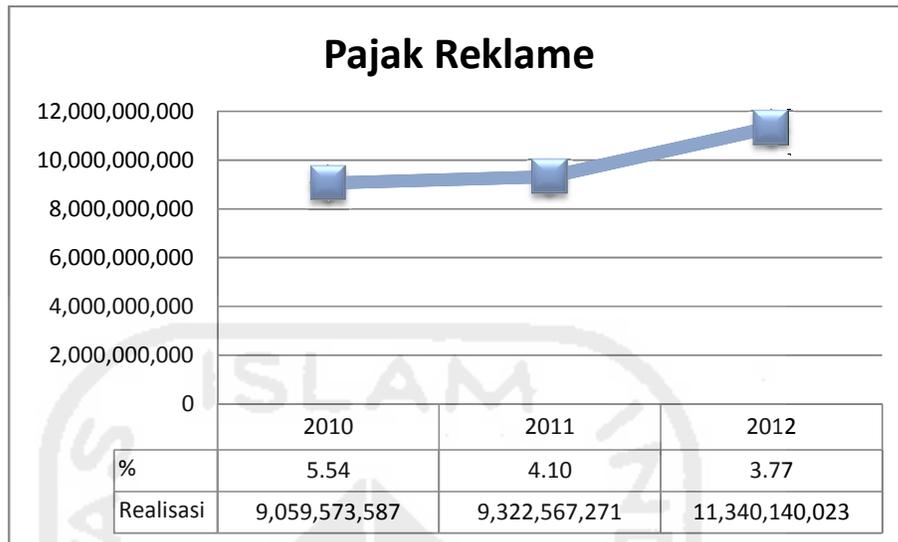
Gambar 4.56

Menurut analisis pada gambar 4.56, pendapatan pajak hotel menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas menunjukkan tidak stabilnya kontribusi persentase pajak hotel pada PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2010 - 2014. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak hotel setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 13,75% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 8,69%.



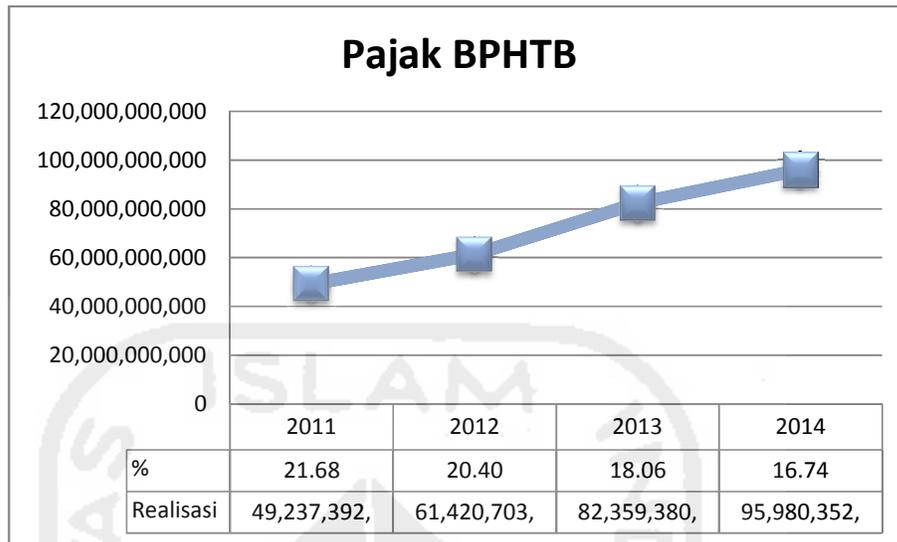
Gambar 4.57

Menurut analisis pada gambar 4.57, pendapatan pajak restoran menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas menunjukkan penurunan kontribusi persentase pajak restoran 2010 – 2013 dan pada tahun 2014 peningkatan kontribusi persentase pajak restoran pada PAD Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak restoran setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 6,24% dan tahun 2013 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 4,61%.



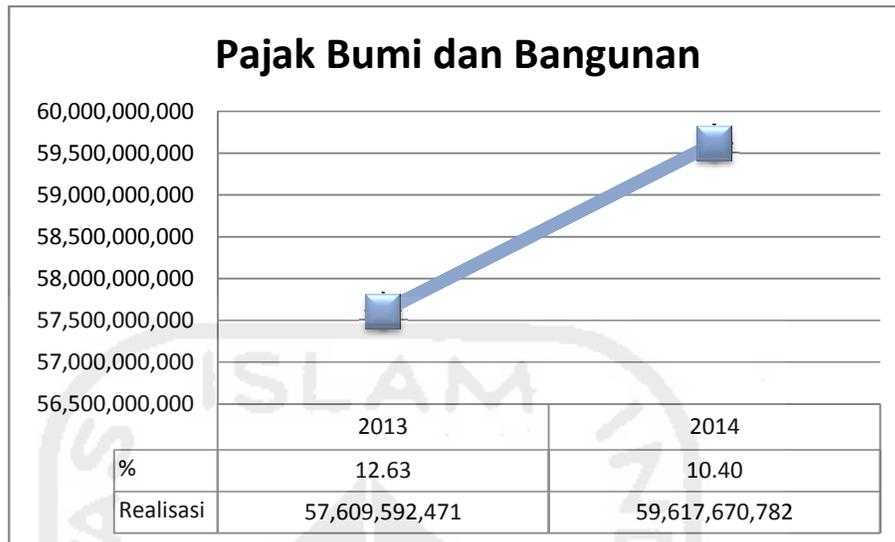
Gambar 4.58

Menurut analisis pada gambar 4.58, pendapatan pajak reklame menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2012. Pada grafik diatas menunjukkan penurunan kontribusi persentase pajak reklame pada PAD Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak reklame setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 5,54% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 3,77%.



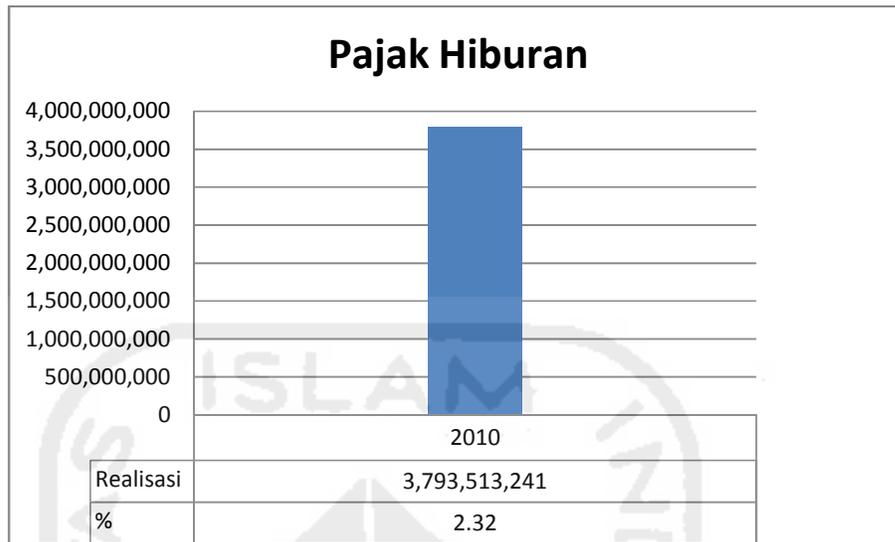
Gambar 4.59

Menurut analisis pada gambar 4.59, pendapatan Pajak BPHTB menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas menunjukkan penurunan kontribusi persentase Pajak BPHTB pada PAD Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan Pajak BPHTB setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 21,68% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 16,74%.



Gambar 4.60

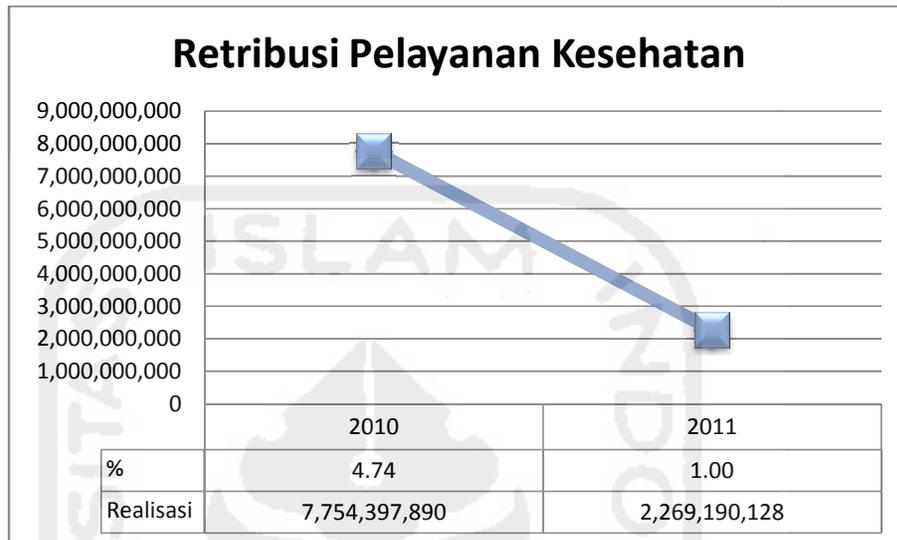
Menurut analisis pada gambar 4.60, pendapatan pajak bumi & bangunan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2013 – 2014. Pada grafik diatas menunjukkan penurunan kontribusi persentase pajak bumi & bangunan pada PAD Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan realisasi pendapatan pajak bumi & bangunan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2013 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 12,63% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 10,40%.



Gambar 4.61

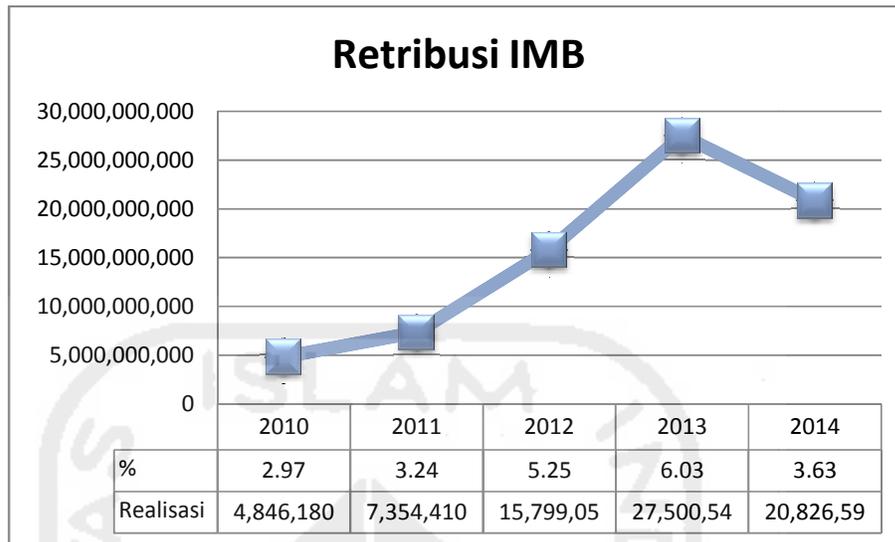
Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.61, pendapatan pajak hiburan pada tahun 2010 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 3,793,513,241 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 2,32 % terhadap PAD Sleman.

2. Laporan Kontribusi Retribusi Daerah Kabupaten Sleman



Gambar 4.62

Menurut analisis pada gambar 4.62, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan menunjukkan penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2011. Pada grafik diatas menunjukkan penurunan kontribusi persentase retribusi pelayanan kesehatan pada PAD Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan realisasi retribusi pelayanan kesehatan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 4,74% dan tahun 2011 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 1%.



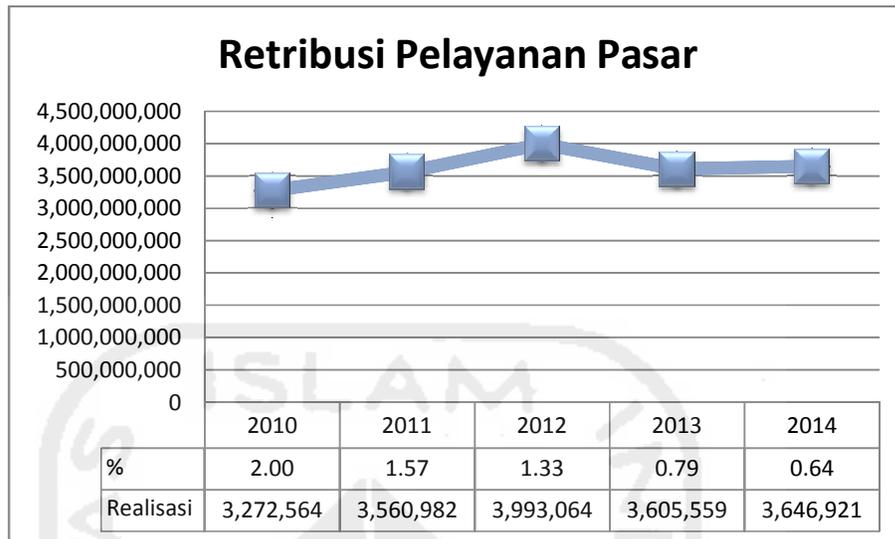
Gambar 4.63

Menurut analisis pada gambar 4.63, pendapatan retribusi IMB menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas menunjukkan peningkatan kontribusi persentase retribusi IMB pada PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2010 – 2013, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan kontribusi persentase. Hal ini disebabkan realisasi retribusi IMB setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2013 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 6,03% dan tahun 2010 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 2,97%.



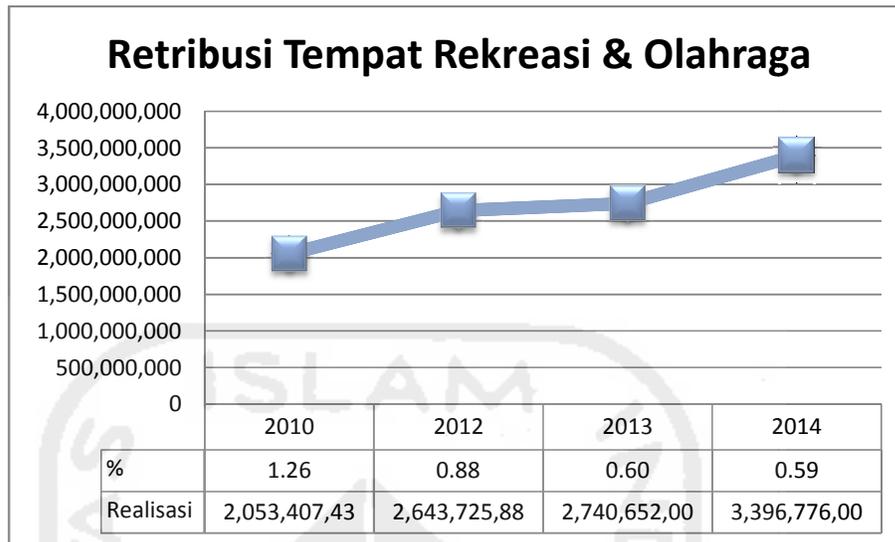
Gambar 4.64

Menurut analisis pada gambar 4.64, pendapatan retribusi izin peruntukan penggunaan tanah menunjukkan penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2010 & 2011. Pada grafik diatas menunjukkan penurunan kontribusi persentase retribusi izin peruntukan penggunaan tanah pada PAD Kabupaten Sleman pada tahun 2010 – 2011. Hal ini disebabkan realisasi retribusi izin peruntukan penggunaan tanah setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 4,65% dan tahun 2011 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,75%.



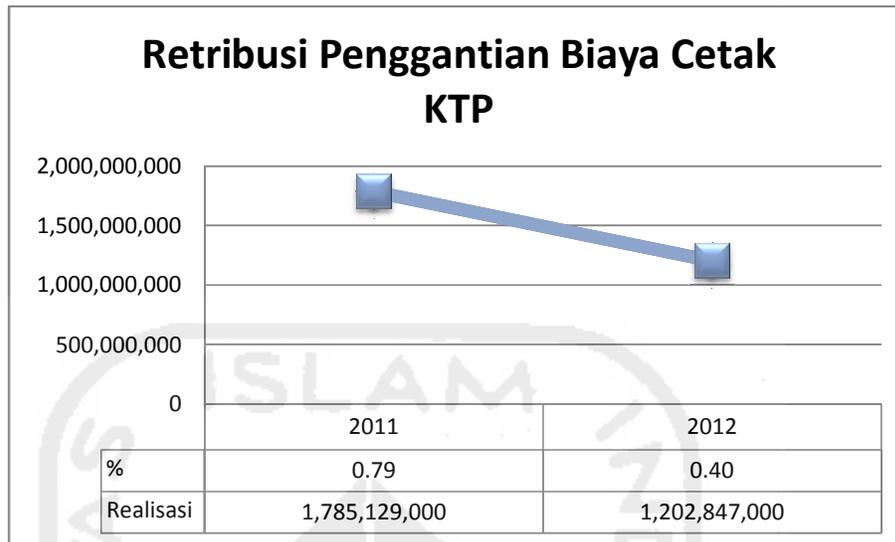
Gambar 4.65

Menurut analisis pada gambar 4.65, pendapatan retribusi pelayanan pasar menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2012, dan pada tahun 2013 – 2014 menunjukkan penurunan realisasi pendapatan. Pada grafik di atas menunjukkan pada tahun 2010 – 2014 terjadi penurunan kontribusi persentase pelayanan pasar pada PAD Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan realisasi pelayanan pasar setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 2,00% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,64%.



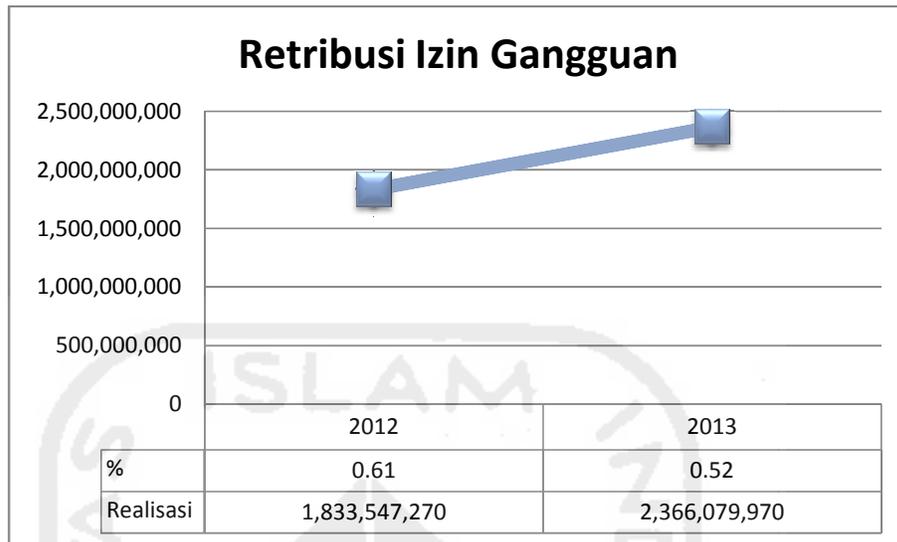
Gambar 4.66

Menurut analisis pada gambar 4.66, pendapatan retribusi tempat rekreasi & olahraga menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan pada tahun 2010 – 2014 terjadi penurunan kontribusi persentase retribusi tempat rekreasi & olahraga pada PAD Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan realisasi retribusi tempat rekreasi & olahraga setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 1,26% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,59%.



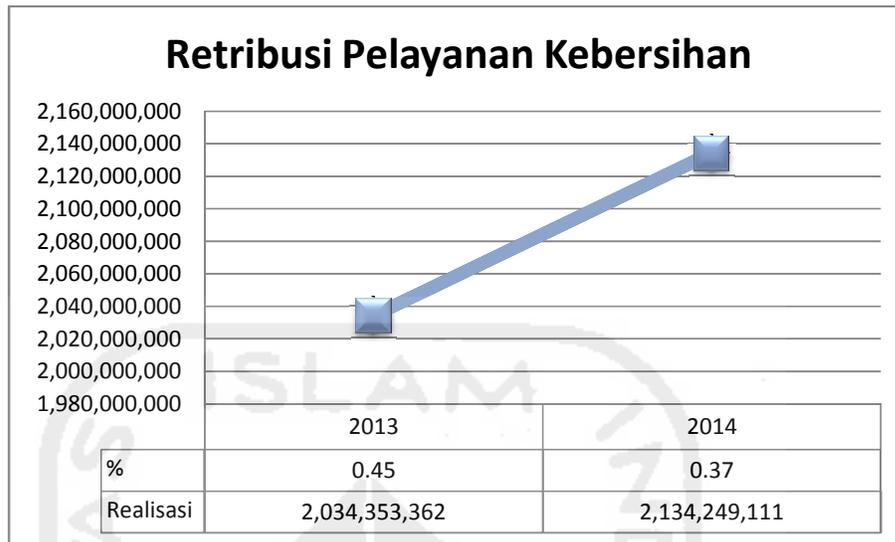
Gambar 4.67

Menurut analisis pada gambar 4.67, pendapatan retribusi penggantian biaya cetak KTP menunjukkan penurunan realisasi pendapatan pada tahun 2011 – 2012. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan kontribusi persentase retribusi penggantian biaya cetak KTP pada PAD Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan realisasi retribusi penggantian biaya cetak KTP setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,79% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,40%.



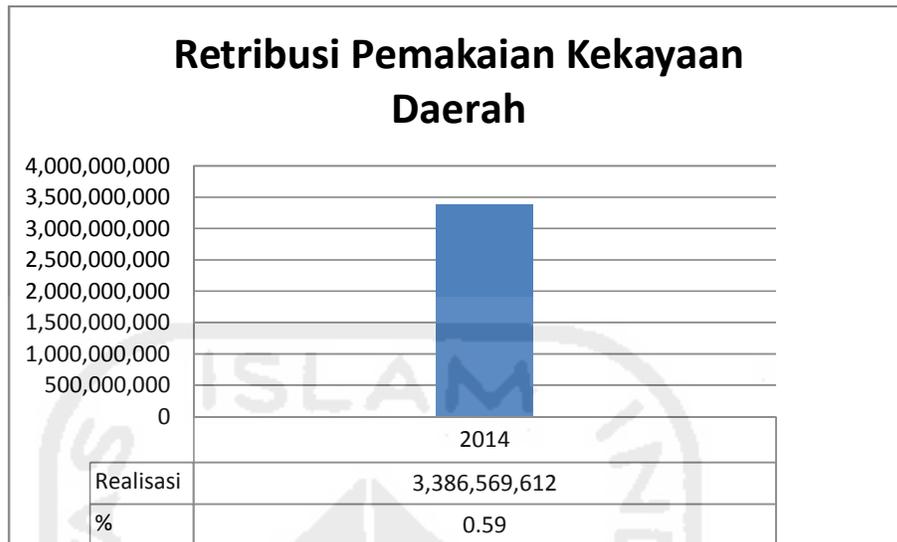
Gambar 4.68

Menurut analisis pada gambar 4.68, pendapatan retribusi izin gangguan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2012 – 2013. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan kontribusi persentase retribusi izin gangguan pada PAD Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan realisasi retribusi izin gangguan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,61% dan tahun 2013 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,52%.



Gambar 4.69

Menurut analisis pada gambar 4.69, pendapatan retribusi pelayanan kebersihan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2013 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan kontribusi persentase retribusi pelayanan kebersihan pada PAD Kabupaten Sleman. Hal ini disebabkan realisasi retribusi pelayanan kebersihan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kabupaten Sleman (lihat tabel 4.4), sehingga dapat disimpulkan tahun 2013 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,45% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,37%.



Gambar 4.70

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.70, pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2014 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 3,386,569,612 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 0,59 % terhadap PAD Sleman.

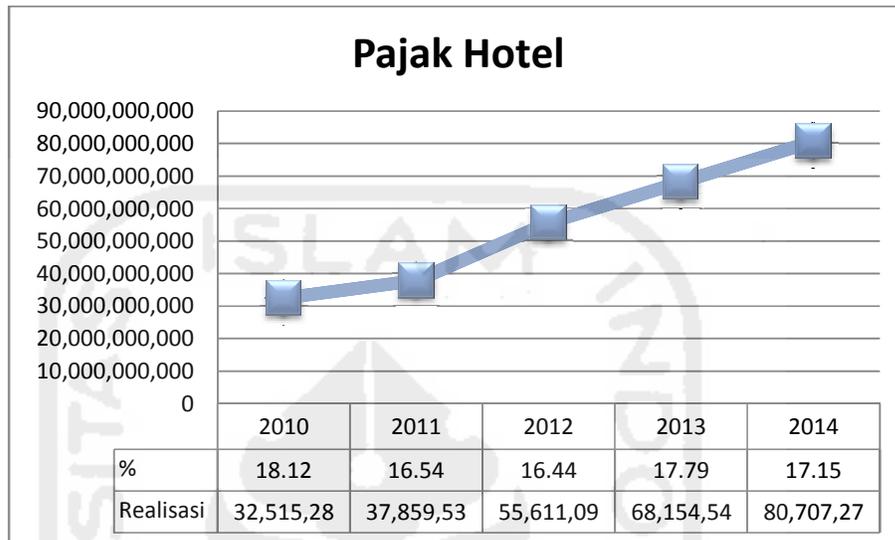
e. **Kota Yogyakarta**

Berikut ini ditampilkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kota Yogyakarta pada tahun 2010-2014. Laporan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta, dengan cara dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahunnya. Laporan Realisasi Anggaran ini disajikan dalam 5 besar pendapatan tertinggi di masing-masing klasifikasi pendapatannya. Hal ini dilakukan agar dapat diketahui berapa persentase kontribusi masing-masing pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta. Mengingat laporan realisasi anggaran ini disajikan dalam 5 besar pendapatan tertinggi pada setiap tahunnya, pada 1 jenis pemasukan pajak daerah dan retribusi daerah tidak akan selalu ditampilkan selama 5 tahun pada laporan tersebut. Berikut ini akan disertakan tabel Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta tahun 2010 – 2014 :

Tabel 4.5

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Asli Daerah		
PAD Yogyakarta 2010	175,872,008,293	179,423,924,652
PAD Yogyakarta 2011	203,838,217,886	228,870,559,646
PAD Yogyakarta 2012	283,024,524,539	338,283,728,285
PAD Yogyakarta 2013	354,321,285,855	383,052,140,420
PAD Yogyakarta 2014	404,272,607,099	470,641,528,444

1. Laporan Kontribusi Pajak Daerah Kota Yogyakarta



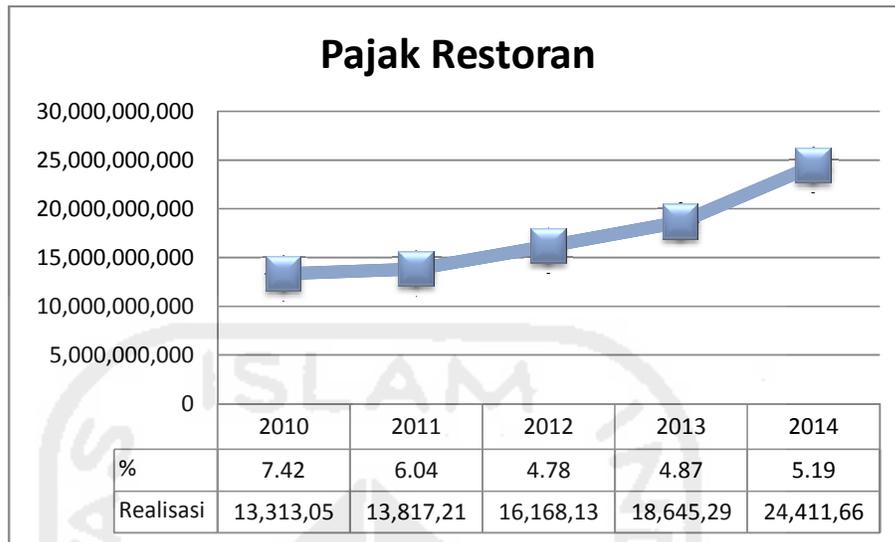
Gambar 4.71

Menurut analisis pada gambar 4.71, pendapatan pajak hotel menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan belum stabilnya kontribusi persentase pendapatan pajak hotel pada PAD Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan realisasi pajak hotel setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 18,12% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 16,44%.



Gambar 4.72

Menurut analisis pada gambar 4.72, pendapatan pajak penerangan jalan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan tidak stabilnya persentase kontribusi pendapatan penerangan jalan pada PAD Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi penerangan jalan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 12,52% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 7,74%.



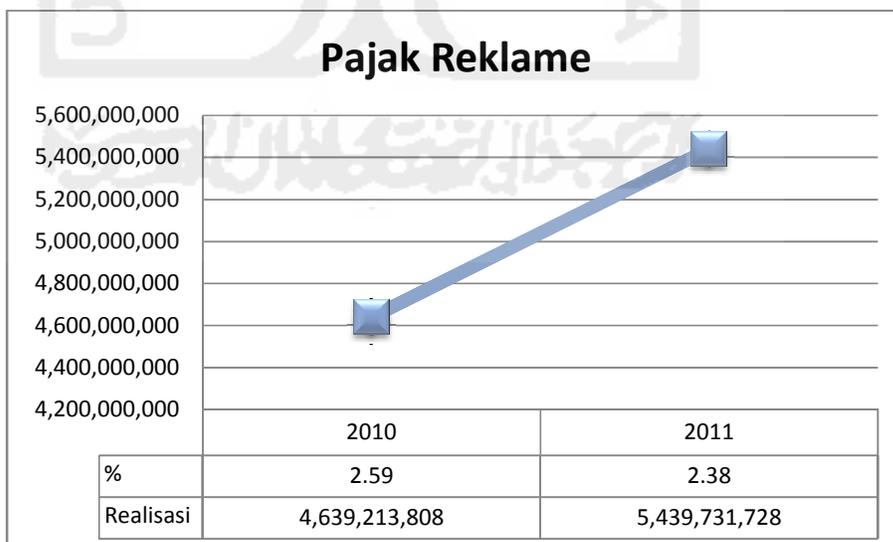
Gambar 4.73

Menurut analisis pada gambar 4.73, pendapatan pajak restoran menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik di atas juga menunjukkan penurunan persentase kontribusi pendapatan pajak restoran pada PAD Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pajak restoran setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 7,42% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 4,78%.



Gambar 4.74

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, menurut gambar 4.74, pendapatan pajak hiburan pada tahun 2010 menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp. 4,646,317,241 dan kontribusi terhadap data pendapatan asli daerah sesuai sebesar 2,59 % terhadap PAD Yogyakarta.



Gambar 4.75

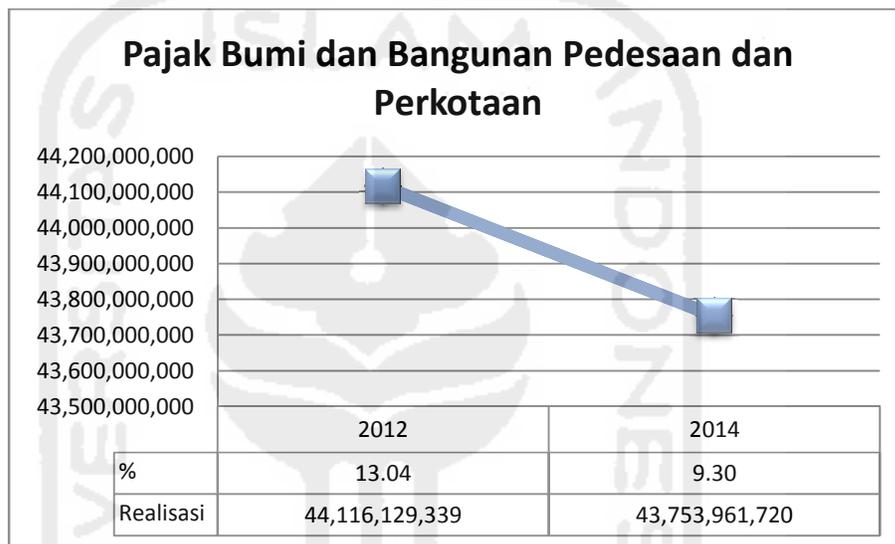
Menurut analisis pada gambar 4.75, pendapatan pajak reklame menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 & 2011. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan persentase kontribusi pendapatan pajak reklame pada PAD Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pajak reklame setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 2,59% dan tahun 2011 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 2,38%.



Gambar 4.76

Menurut analisis pada gambar 4.76, pendapatan pajak BPHTB menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 & 2011. Pada grafik diatas juga menunjukkan pendapatan pada tahun 2013 dan 2014 mengalami penurunan persentase kontribusi pendapatan pajak BPHTB pada PAD Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pajak BPHTB

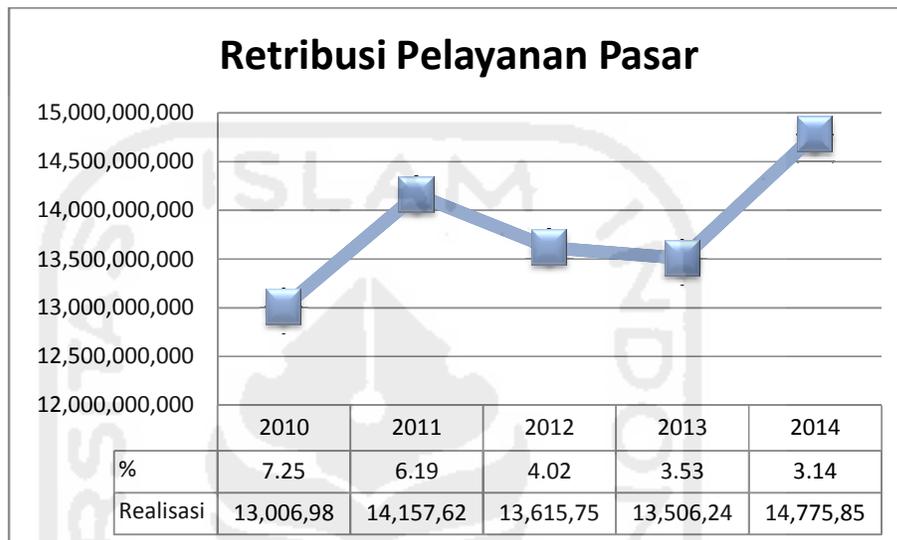
setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 2,59% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 15,65%.



Gambar 4.77

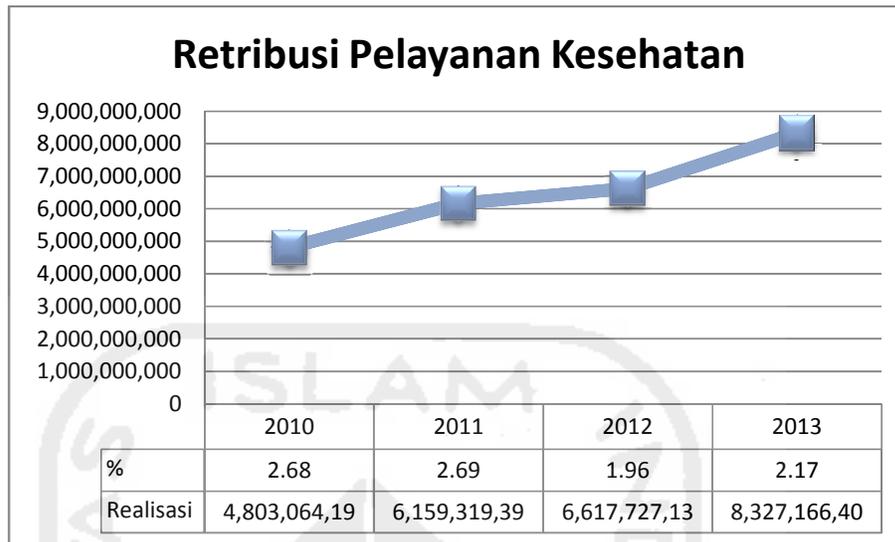
Menurut analisis pada gambar 4.77, menunjukkan pendapatan pajak bumi & bangunan pedesaan & perkotaan tingkatan realisasi pendapatan pada tahun 2012 & 2014. Pada grafik diatas juga menunjukkan pendapatan pada tahun tersebut mengalami penurunan persentase kontribusi pajak bumi & bangunan pedesaan & perkotaan pada PAD Kota Yogyakarta pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan realisasi pajak bumi & bangunan pedesaan & perkotaan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 2,59% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 15,65%.

2. Laporan Kontribusi Retribusi Daerah Kota Yogyakarta



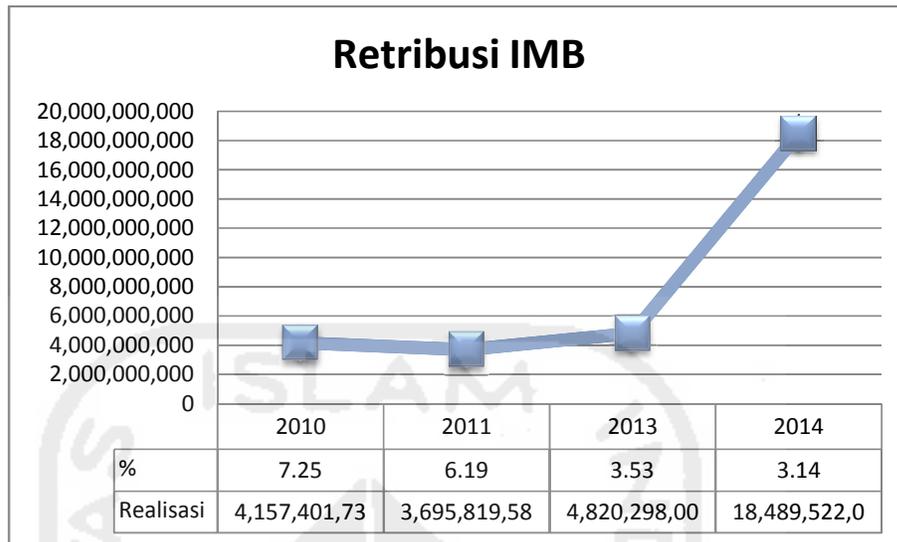
Gambar 4.78

Menurut analisis pada gambar 4.78, pendapatan retribusi pelayanan pasar menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2014. Pada grafik di atas juga menunjukkan pada tahun 2010 – 2014 terjadi penurunan kontribusi persentase retribusi pelayanan pasar pada PAD Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan realisasi retribusi pelayanan pasar setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 7,25% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 3,14%.



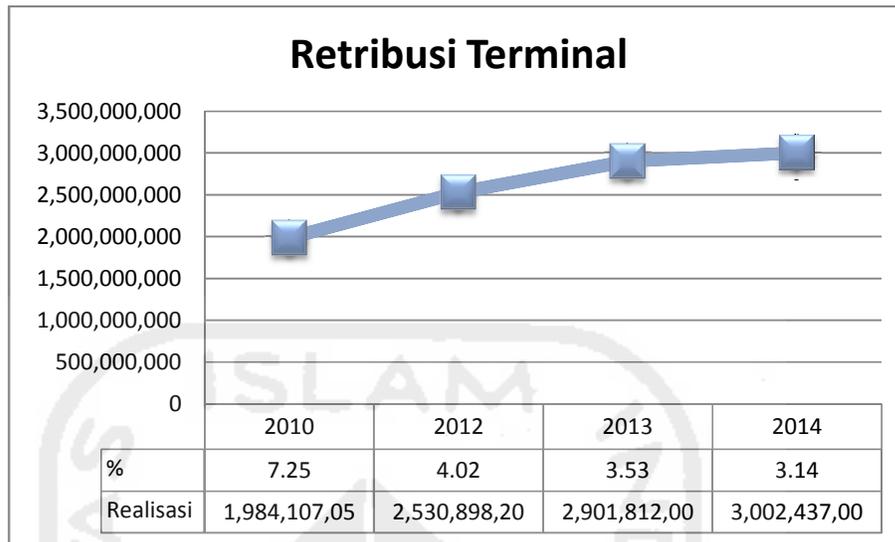
Gambar 4.79

Menurut analisis pada gambar 4.79, pendapatan retribusi pelayanan kesehatan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan pada tahun 2010 – 2013. Pada grafik diatas juga menunjukkan tidak stabilnya pertumbuhan persentase kontribusi retribusi pelayanan kesehatan pada setiap tahunnya terhadap PAD Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan realisasi retribusi pelayanan kesehatan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2012 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 2,96% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 1,96%.



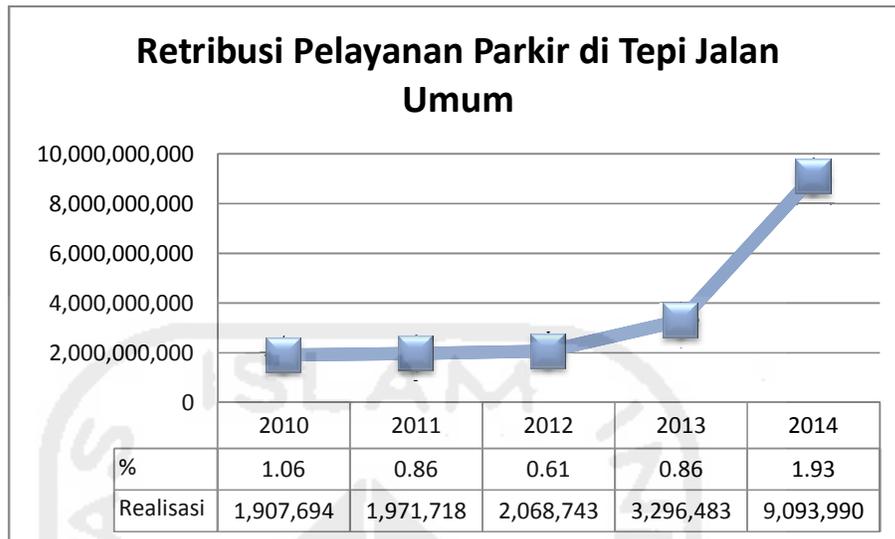
Gambar 4.80

Menurut analisis pada gambar 4.80, pendapatan retribusi IMB menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan, kecuali pada tahun 2011. Pada grafik diatas juga menunjukkan penurunan pertumbuhan persentase kontribusi retribusi pada setiap tahunnya terhadap PAD Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan realisasi retribusi IMB setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 7,25% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 3,14%.



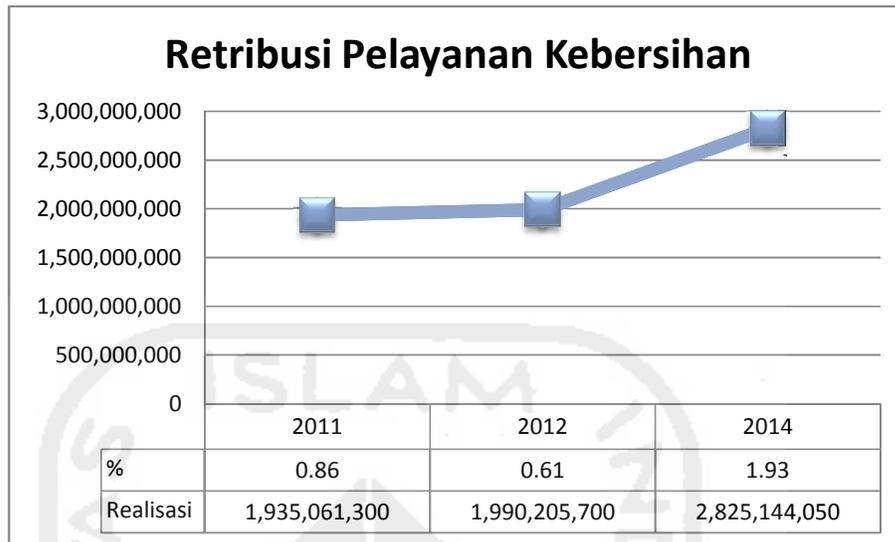
Gambar 4.81

Menurut analisis pada gambar 4.81, pendapatan retribusi terminal menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan. Pada grafik di atas menunjukkan penurunan pertumbuhan persentase kontribusi retribusi terminal pada setiap tahunnya terhadap PAD Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan realisasi retribusi terminal setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2010 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 7,25% dan tahun 2014 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 3,14%.



Gambar 4.82

Menurut analisis pada gambar 4.82, pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan. Pada grafik di atas menunjukkan penurunan pertumbuhan persentase kontribusi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum pada setiap tahunnya terhadap PAD Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2014 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 1,93% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,61%.



Gambar 4.83

Menurut analisis pada gambar 4.83, pendapatan retribusi pelayanan kebersihan menunjukkan peningkatan realisasi pendapatan. Pada grafik di atas menunjukkan penurunan persentase kontribusi retribusi pelayanan kebersihan pada tahun 2012, dan mengalami peningkatan pada tahun 2014 terhadap PAD Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan realisasi retribusi pelayanan kebersihan setiap tahun yang dibagi dengan jumlah PAD Kota Yogyakarta (lihat tabel 4.5), sehingga dapat disimpulkan tahun 2011 merupakan kontribusi tertinggi sebesar 0,86% dan tahun 2012 merupakan kontribusi yang terendah sebesar 0,61%.

4.2.2 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.

Pajak daerah merupakan salah satu elemen Pendapatan Asli Daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Menurut Mardiasmo (2002) fungsi pajak daerah menurut pemungutannya terdiri dari dua macam yaitu: Fungsi pendanaan (*budgeter*) pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, dan fungsi mengatur (*reguler*) pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dalam melaksanakan fungsi pendanaan dari pajak, serta dalam rangka menciptakan pemerintahan yang mandiri, Pemerintah Daerah maupun Pusat berhak untuk menarik pajak dari masyarakat guna mendukung dan membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

Masing-masing Pemerintahan Daerah di seluruh Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memungut pajak kepada masyarakatnya. Pemungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tentunya mengacu pada Undang-Undang tentang perpajakan yang berlaku dan berdasarkan objek dan tarif dari pajak daerah.

Analisis kontribusi pajak daerah yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yang dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak daerah tersebut setiap tahunnya. Analisis yang dilakukan pada laporan realiasi anggaran di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, disajikan dalam tampilan 5 besar pendapatan tertinggi pada tahun 2010-2014 yang tentunya tidak akan selalu mendapat pemasukan jenis pajak yang sama pada setiap tahunnya, mengingat potensi pendapatan pajak dan keunggulan di setiap Kabupaten/Kota berbeda – beda.

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap daerah mempunyai karakteristik keunggulan potensi pajak daerah yang berbeda - beda, sehinggatercipta perbedaan penerimaan pendapatan pajak daerah di setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendapatan pajak daerah di setiap Kabupaten/Kota mengalami peningkatan pendapatan pajak daerah setiap tahunnya. Pada 5 besar pendapatan pajak daerah tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2010-2014, terlihat penurunanpersentase kontribusi setiap jenis pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota. Hal ini dirasa wajar karena pendapatan di masing-masing jenis pajak daerah mengalami peningkatan pada setiap tahun, diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah pada seluruh Kabupaten/Kota, sehingga persentase kontribusinya terlihat menurun setiap tahunnya. Meskipun begitu, tidak mengurangi keyakinan bahwa pendapatan pajak daerah tetap menjadi salah satu

elemen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi DIY.

Retribusi daerah merupakan salah satu elemen pendapatan asli daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang dipungut sebagai pembayaran atau imbalan langsung atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Saragih,2003). Perbedaan utama retribusi dari pajak adalah pada retribusi terdapat kontra-prestasi langsung. Hal tersebut berarti pihak pembayar retribusi melakukan pembayaran karena ditujukan untuk memperoleh prestasi tertentu dari pemerintah misalnya untuk mendapatkan ijin atas usaha tertentu. Pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa jasa atau pemberian ijin tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan organisasi (Prakosa, 2005).

Dengan demikian unsur pemaksaan pada retribusi lebih didasarkan pada hal-hal ekonomis, sedangkan pajak daerah adalah tanpa imbalan langsung yang seimbang kepada wajib pajak. Jadi retribusi lebih menyerupai harga dalam proses jual beli secara bebas. Akan tetapi, retribusi bukan merupakan seluruh harga barang atau jasa yang dinikmati oleh pembayar retribusi sebagai pajak yang bersifat khusus. Retribusi juga harus berdasarkan peraturan daerah yang harus

disetorkan pada kas negara atau daerah. Jenis retribusi jasa usaha untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap daerah mempunyai karakteristik keunggulan potensi retribusi daerah yang berbeda - beda, sehingga tercipta perbedaan penerimaan pendapatan retribusi daerah di setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hampir sama dengan pajak daerah, Pendapatan retribusi daerah di setiap Kabupaten/Kota mengalami peningkatan pendapatan setiap tahunnya. Pada 5 besar pendapatan retribusi daerah tertinggi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2010-2014, juga terlihat penurunan persentase kontribusi setiap jenis retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota. Hal ini dirasa wajar karena pendapatan di masing-masing jenis retribusi daerah mengalami peningkatan pada setiap tahun, diikuti oleh peningkatan pendapatan asli daerah pada seluruh Kabupaten/Kota, sehingga persentasenya terlihat menurun setiap tahunnya. Meskipun begitu, tidak mengurangi keyakinan bahwa pendapatan retribusi daerah juga termasuk salah satu elemen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di masing-masing Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Tingkat pencapaian realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan Pendapatan Asli Daerah dengan target anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2010-2014.

Dalam rangka menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik serta perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan daerah lainnya. Sehingga di masa yang akan datang, Pemerintah Daerah dapat mengelola, membangun biaya pembangunannya secara mandiri, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2004.

Menurut hasil penelitian diatas menemukan tingkat pencapaian realisasi pajakdaerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerahdengan target anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2010-2014menunjukkan progress baik di setiap tahunnya. Meskipun dalam beberapa sektor pendapatan tidak mencapai target yang ditetapkan, namun sebagian besar realisasi yang didapatkan pada setiap tahunnya melebihi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang digunakan untuk mendapatkan hasil realisasi pencapaian pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan anggaran yang ditetapkan masing-masing Pemerintah Daerah

dengan realisasi pendapatan pada setiap tahunnya. Menurut laporan keuangan pada 5 Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (lihat pada lampiran 8), Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki target pada pendapatan Pajak BPHTB sebesar Rp. 18.470.684.800, namun pada realisasi pendapatannya Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan pemasukan dari sektor pajak ini sebesar Rp. 27.746.383.081. Contoh lain pada Pemerintah Kabupaten Sleman yang memiliki target pendapatan pada Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2013 sebesar Rp. 9.300.000.000 , namun pada realisasi pendapatannya Pemerintah Kabupaten Sleman mendapatkan pemasukan dari sektor retribusi ini sebesar Rp. 27.500.540.096. Meskipun dalam beberapa sektor pendapatan di setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat beberapa pemasukan yang tidak mencapai target yang ditetapkan, namun fakta pemasukan ini mampu mendukung setiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menciptakan kemandirian dan pembangunan daerah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pajak daerah di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun dengan persentase kontribusinya yang menurun dari tahun 2010 sampai 2014. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah selalu menunjukkan kenaikan pendapatan sehingga tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Retribusi daerah di Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun dengan persentase kontribusinya yang menurun dari tahun 2010 sampai 2014. Hal ini dikarenakan realisasi pendapatan asli daerah selalu menunjukkan kenaikan pendapatan sehingga tidak terlalu mempengaruhi secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tingkat pencapaian realisasi pendapatan asli daerah di setiap tahunnya tercatat melebihi target anggaran yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Menurut hasil penelitian diatas menemukan tingkat pencapaian realisasi pajakdaerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah dengan target anggaran

yang ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY tahun 2010-2014 menunjukkan progress baik di setiap tahunnya. Fakta ini akan mendukung Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi DIY dalam menciptakan kemandirian dan pembangunan daerah dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang baik kepada masyarakat.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Dinas berwenang di Pemerintah Daerah antar Kabupaten/Kota di DIY

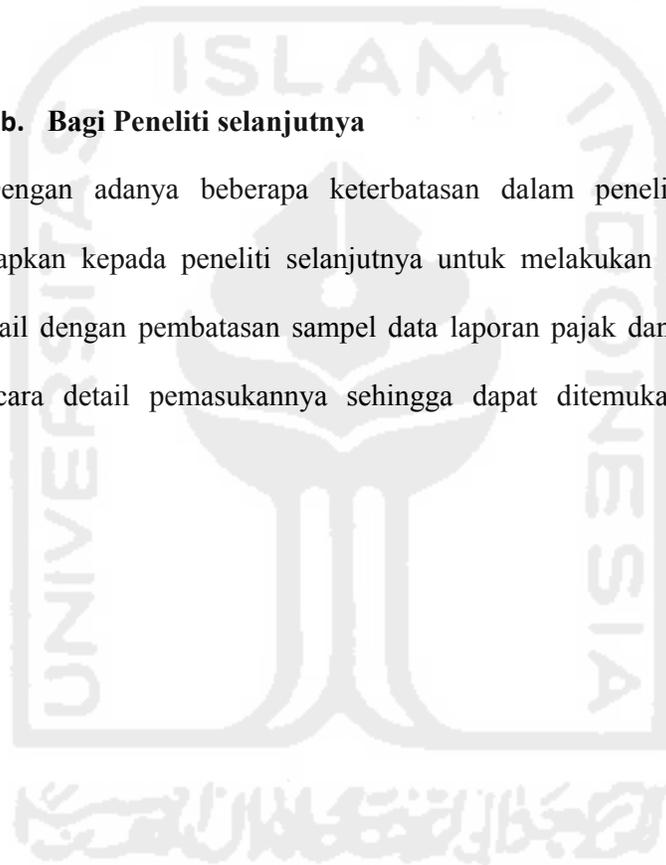
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka sebagai bahan pertimbangan dikemukakan beberapa saran bagi Dinas berwenang di Pemerintah Daerah antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta:

Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan pendapatan yang sudah baik, sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, dengan tetap memperbaiki kekurangan di sisten pemungutan pajak dan retribusi daerah, selalu melakukan pengawasan terhadap sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah secara berkala agar dapat meminimalisir resiko kecurangan dari oknum yang tidak bertanggungjawab dalam penyampaian omset pendapatannya. Dinas di Pemerintahan juga perlu melakukan inovasi dan terobosan baru agar

kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah semakin besar di setiap tahunnya. Selain itu, proses penetapan target yang dilakukan sebelumnya, selalu memperhatikan potensi yang sebenarnya, sesuai dengan keadaan dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sehingga pemungutannya akan termotivasi untuk melampaui target yang ditetapkan.

b. Bagi Peneliti selanjutnya

Dengan adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, penulis mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian sejenis lebih detail dengan pembatasan sampel data laporan pajak dan retribusi daerah, tidak secara detail pemasukannya sehingga dapat ditemukan hasilnya lebih optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai :Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Kabupaten Bantul, DPPKAD. 2016. *Profil DPPKAD Kab. Bantul*.
- Kabupaten Gunungkidul, DPPKAD. 2015. *Profil DPPKAD Kab. Gunungkidul*.
- Kabupaten Kulonprogo, DPPKAD. 2015. *Profil DPPKA Kab. Kulonprogo*.
- Kota Yogyakarta, DPDPK. 2015. *Profil DPDPK Kota Yogyakarta*.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan edisi revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marita, Ni Made.2016. *Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Denpasar*. Vol. 14 No.1. Januari 2016. Hal.53-65.
- Octovido, Irsandy., Sudjana, Nengah., Azizah, Farah Devi. 2014. *Analisisefektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu*. Vol.15. No. 1. Oktober 2014.
- Peraturan Bupati Sleman no.50 tahun 2011tentang Uraian Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja Dispenda*.
- Prakosa, KesitBambang.2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: UII Press

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat

UU No. 11 1957 Darurat Tahun tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.

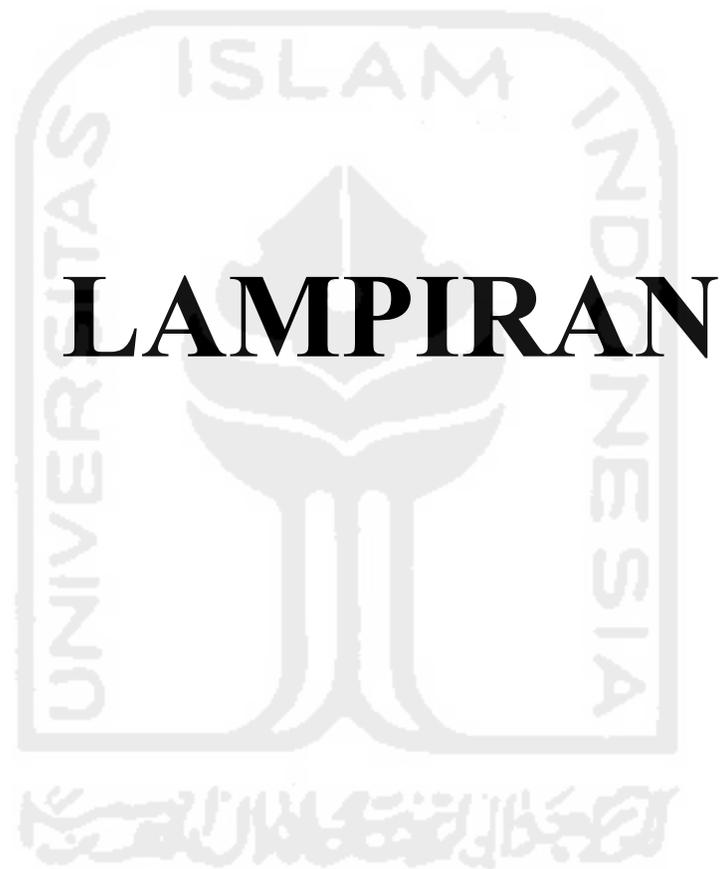
UU No. 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menggantikan UU No. 34 Tahun 2000.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat





LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ekonomi UII

 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 179/DEK/10/Div.SDM/V/2016 19 Mei 2016
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama : Rozaq Yomara
No. Mahasiswa : 11 312 458
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Perum Candi Gebang,Sleman,DIY

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Antar Kabupaten / Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta"

Dosen Pembimbing : Arief Rahman, SE., M.Com.,P.hD.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Degan,


Dr. D. Agus Harjito, M.Si
NIK. 87 311 0103

LAMPIRAN 2

Surat Izin Penelitian dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY

 **PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

www.pemerintah.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/REG/V/336/5/2016

Membaca Surat : **DEKAN FAKULTAS EKONOMI** Nomor : **174/DEK/10/DIV.SDM/V/2016**
Tanggal : **11 MEI 2016** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **ROZAQ YOMARA** NIP/NIM : **11 312 458**
Alamat : **FAKULTAS EKONOMI , AKUNTANSI , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
Judul : **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi :
Waktu : **16 MEI 2016 s/d 16 AGUSTUS 2016**

Dengan Ketentuan

- Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
- Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
- Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
- Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
- Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **16 MEI 2016**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan


Drs. Tri Mulvono, MM
NIP. 19620830 198903 1 006

Tembusan :

- GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)**
- WALIKOTA YOGYAKARTA C.Q DINAS PERIJINAN KOTA YOGYAKARTA**
- BUPATI BANTUL C.Q BAPPEDA BANTUL**
- BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN**
- BUPATI GUNUNGKIDUL C.Q KPPTSP GUNUNGKIDUL**
- BUPATI KULON PROGO C.Q KPT KULON PROGO**
- DEKAN FAKULTAS EKONOMI , UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
- YANG BERSANGKUTAN**

LAMPIRAN 3

Surat Izin Penelitian dari Kabupaten Bantul

 **PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)
Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN
Nomor : 070 / Reg / 2343 / S1 / 2016

Menunjuk Surat : Dari : Sekretariat Daerah DIY Nomor : 070/REGV/336/5/2016
Tanggal : 16 Mei 2016 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat : a. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada

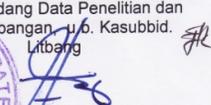
Nama : **ROZAQ YOMARA**
P. T / Alamat : **Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta**
Prawirokuat, Condong catur Yogyakarta
NIP/NIM/No. KTP : **6471021506930001**
Nomor Telp./HP : **085246576095**
Tema/Judul Kegiatan : **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**
Lokasi : **DPPKAD Kab Bantul**
Waktu : **18 Mei 2016 s/d 16 Agustus 2016**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
Pada tanggal : 17 Mei 2016

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Data Penelitian dan
Pengembangan, u.b. Kasubbid.
Litbang


Heny Endrawati, S.P., M.P.
NIP: 197106081998032004



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Bantul (sebagai laporan)
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Bantul
4. Dekan Fakultas Ekonomi, UII Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)

LAMPIRAN 4

Surat Izin Penelitian dari Kabupaten Gunungkidul

**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
Alamat : Jl. Brigjen. Katamso No.1 Wonosari Telp. 391942 Kode Pos : 55812

SURAT KETERANGAN / IJIN
Nomor : 486/KPTS/05/2016

Membaca : Surat dari Setda D I Yogyakarta, Nomor : 070/REG/V/336/5/2016 , hal : Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;
2. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri;
3. Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan kepada :
Nama : **ROZAQ YOMARA NIM : 11312458**
Fakultas/Instansi : Ekonomi / Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat Instansi : Jl. Pawiro kuat, Condongcatur, Depok, Sleman
Alamat Rumah : Dusun Gebang No.04 RT/RW 45/05, Sleman
Keperluan : Ijin Penelitian dengan judul " ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RESTRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA "

Lokasi Penelitian : DPPKAD Kab. Gunungkidul
Dosen Pembimbing : Arief Rachan,SE.,M.Com., P.hD
Waktunya : Mulai tanggal : 16/05/2016 sd. 16/08/2016
Dengan ketentuan :

Terlebih dahulu memenuhi/melaporkan diri kepada Pejabat setempat (Camat, Lurah/Kepala Desa, Kepala Instansi) untuk mendapat petunjuk seperlunya.

1. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
2. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Gunungkidul (cq. BAPPEDA Kab. Gunungkidul) dalam bentuk softcopy format pdf yang disimpan dalam keeping compact disk (CD) dan dalam bentuk data yang dikirim via email ke alamat : litbangbappeda.gk@gmail.com dengan tembusan ke kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dengan alamat email : kpadgunungkidul@vmail.com
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
4. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
5. Surat ijin ini dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas. Kemudian kepada para Pejabat Pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Wonosari
Pada Tanggal 16 Mei 2016
An. BUPATI GUNUNGKIDUL
KEPALA

Dr. AZIS SALEH
NIP. 19660603 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Kab. Gunungkidul (Sebagai Laporan) ;
2. Kepala BAPPEDA Kab. Gunungkidul ;
3. Kepala Kantor KESBANGPOL Kab. Gunungkidul ;
4. Kepala DPPKAD Kab. Gunungkidul ; ;
5. Arsip ;

LAMPIRAN 5

Surat Izin Penelitian dari Kabupaten Kulonprogo



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU
Unit 1: Jl. Perwakilan No. 1, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611
Website: bpmpt.kulonprogokab.go.id Email : bpmpt@kulonprogokab.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070.2 /00511/V/2016

Memperhatikan : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi DIY Nomor: 070/REG/v/336/5/2016, Tanggal: 16 Mei 2016, Perihal: Izin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 73 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu..

Diizinkan kepada : **ROZAQ YOMARA**
NIM / NIP : 11312458
PT/Instansi : **UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA**
Keperluan : **IZIN PENELITIAN**
Judul/Tema : **ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Lokasi : **DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

Waktu : 16 Mei 2016 s/d 16 Agustus 2016

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates
Pada Tanggal : 18 Mei 2016

**KEPALA
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU**



Tembusan kepada Yth. :

1. Bupati Kulon Progo (Sebagai Laporan)
2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
4. Kepala DPKKA Kabupaten Kulon Progo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN 6

Surat Izin Penelitian dari Kabupaten Sleman

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</p> <p style="text-align: center;">Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511 Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800 Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id</p>
SURAT IZIN	
Nomor : 070 / Bappeda / 2198 / 2016	
TENTANG PENELITIAN	
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Dasar	: Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk	: Surat dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman Nomor : 070/Kesbang/2106/2016 Hal : Rekomendasi Penelitian
	Tanggal : 18 Mei 2016
MENGIZINKAN :	
Kepada	:
Nama	: ROZAQ YOMARA
No.Mhs/NIM/NIP/NIK	: 11.312.458
Program/Tingkat	: S1
Instansi/Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi	: Jl. Pawiro Kuat CC Depok Sleman
Alamat Rumah	: Jl. Sidomulyo RT 40 No 62 Kel. Baru Tengah Balikpapan Barat Balikpapan Kaltim
No. Telp / HP	: 085246576095
Untuk	: Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Lokasi	: Dipenda Kab. Sleman
Waktu	: Selama 3 Bulan mulai tanggal 18 Mei 2016 s/d 17 Agustus 2016
Dengan ketentuan sebagai berikut :	
<ol style="list-style-type: none">1. <i>Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.</i>2. <i>Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.</i>3. <i>Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.</i>4. <i>Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.</i>5. <i>Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.</i>	
Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.	
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.	
Dikeluarkan di Sleman Pada Tanggal : 18 Mei 2016 a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
Tembusan :	
1. Bupati Sleman (sebagai laporan)	
2. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Sleman	
3. Kabid. Ekonomi Bappeda Kab. Sleman	
4. Dekan Fak. Ekónomi UII Yogyakarta	
5. Yang Bersangkutan	
	 Sekretaris Kepala Bidang Statistik, Penelitian, dan Perencanaan ERNY MARYATUN, S.IP, MT Pembina TV/a

LAMPIRAN 7

Surat Izin Penelitian dari Kota Yogyakarta

	<p>PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA DINAS PERIZINAN Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682 Fax (0274) 555241 E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id</p>
<hr/>	
SURAT IZIN	
NOMOR : 070/2125 3908/34	
Membaca Surat :	Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/REG/V/336/5/2016 Tanggal : 16 Mei 2016
Mengingat :	1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta. 2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah; 3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta; 4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta; 5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
Dijinkan Kepada :	Nama : ROZAQ YOMARA No. Mhs/ NIM : 11312458 Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UII Yogyakarta Alamat : Condong Catur, Yogyakarta Penanggungjawab : Arief Rahman, S.E., M. Com., Ph.D. Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Studi pada Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2014)
Lokasi/Responden :	Kota Yogyakarta
Waktu :	16 Mei 2016 s/d 16 Agustus 2016
Lampiran :	Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan :	1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta) 2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat 3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah 4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya	
Tanda Tangan Pemegang Izin	Dikeluarkan di : Yogyakarta Pada Tanggal : 25 Mei 2016
 ROZAQ YOMARA	Plt. Sekretaris  Drs. SAHLHAN SUMANTRI NIP. 196610041993031008
Tembusan Kepada : Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan) 2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY 3. Ka. DPDPK Kota Yogyakarta 4. Ybs.	

LAMPIRAN 8

Laporan Keuangan Antar Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta

I. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Bantul tahun 2010 - 2014.

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
PAD 2010	89,015,027,965	81,637,099,293
PAD 2011	115,321,898,744	128,896,456,173
PAD 2012	141,624,239,103	166,597,778,029
PAD 2013	205,407,209,787	224,197,864,331
PAD 2014	288,038,728,992	357,411,062,723
HASIL PAJAK DAERAH		
Tahun 2010		
Pajak Penerangan Jalan	13,984,578,000	13,523,963,363
Pajak Reklame	1,800,000,000	1,928,535,601
Pajak Pengembalian Bahan Galian	350,000,000	428,649,389
Pajak Restoran	330,000,000	393,816,400
Pajak Hiburan	130,000,000	149,914,202
Tahun 2011		
Pajak BPHTB	12,000,000,000	15,676,962,928
Pajak Penerangan Jalan	15,000,000,000	14,830,420,831
Pajak Reklame	2,000,000,000	2,078,745,604
Pajak Restoran	1,000,000,000	1,522,413,345
Pajak Pengembalian Bahan Galian	350,000,000	445,485,716
Tahun 2012		
Pajak BPHTB	18,470,684,800	27,746,383,081
Pajak Penerangan Jalan	16,000,000,000	16,460,816,329
Pajak Restoran	1,900,000,000	2,855,070,517
Pajak Reklame	2,000,000,000	2,718,571,111
Pajak Hotel	600,000,000	823,428,554
Tahun 2013		
Pajak BPHTB	22,700,000,000	33,086,420,991

Pajak PBB Pedesaan & Perkotaan	18,900,000,000	21,295,685,318
Pajak Penerangan Jalan	16,200,000,000	19,418,298,535
Pajak Restoran	2,700,000,000	3,762,937,995
Pajak Reklame	2,100,000,000	3,255,704,581
Tahun 2014		
Pajak BPHTB	28,700,000,000	42,872,571,982
Pajak PBB Pedesaan & Perkotaan	20,790,000,000	23,920,112,688
Pajak Penerangan Jalan	21,000,000,000	23,189,669,744
Pajak Restoran	3,000,000,000	4,459,210,988
Pajak Reklame	2,310,000,000	2,513,332,174
HASIL RETRIBUSI DAERAH		
Tahun 2010		
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	4,242,266,750	4,447,688,400
Retribusi Pelayanan Kesehatan	3,341,894,000	3,543,849,955
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1,997,601,000	2,166,976,900
Retribusi Pelayanan Pasar	1,319,309,770	1,380,238,150
Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah	993,409,068	1,366,946,410
Tahun 2011		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	6,177,429,000	5,916,215,515
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	5,111,575,000	5,159,597,200
Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	1,562,745,000	1,625,026,100
Retribusi Pelayanan Pasar	1,357,123,690	1,426,345,000
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	950,000,000	1,140,830,360
Tahun 2012		
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	7,385,195,000	8,080,678,000
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4,457,267,000	4,391,334,450
Retribusi Pelayanan Pasar	1,800,824,800	1,898,948,930
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2,257,560,000	1,750,227,200
Retribusi IMB	1,300,000,000	1,233,771,839
Tahun 2013		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	10,267,250,622	9,421,903,191
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	8,964,215,000	9,238,531,870
Retribusi Pelayanan Pasar	2,027,674,000	2,142,570,861

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1,200,000,000	1,688,418,055
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1,800,235,417	1,580,602,400
Tahun 2014		
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	9,516,054,000	10,061,824,500
Retribusi Pelayanan Kesehatan	8,385,417,341	5,363,540,625
Retribusi IMB	1,400,000,000	2,203,475,286
Retribusi Pelayanan Pasar	2,027,736,900	2,168,246,275
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2,189,050,700	2,211,698,400

II. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Gunungkidul tahun 2010 - 2014

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
PAD2010	40,963,061,130	42,542,031,389
PAD2011	47,953,224,512	54,462,418,772
PAD2012	68,065,973,303	67,050,781,893
PAD2013	76,674,187,127	83,427,447,822
PAD2014	144,367,217,445	159,304,338,202
HASILPAJAKDAERAH		
Tahun 2010		
Pajak Penerangan Jalan	5,800,000,000	5,115,339,964
Pajak Reklame	451,000,000	459,976,000
Pajak Bahan Galian Gol.C	310,000,000	280,962,399
Pajak Restoran	57,500,000	62,093,150
Pajak Hotel	12,000,000	15,310,000
Tahun 2011		
Pajak Penerangan Jalan	6,100,000,000	6,555,657,368
Pajak BPHTB	400,000,000	583,403,744
Pajak Reklame	525,000,000	536,066,600
Pajak Bahan Galian Gol.C	108,880,000	261,097,760
Pajak Restoran	68,000,000	85,368,950

Tahun2012		
PajakPeneranganJalan	6,480,000,000	6,681,935,023
PajakBPHTB	830,000,000	1,512,454,170
PajakRestoran	527,000,000	817,454,404
PajakMineralbukanLogam&Batuan	326,000,000	739,343,585
PajakReklame	565,000,000	606,583,500
Tahun2013		
PajakPeneranganJalan	7,370,000,000	7,715,068,292
PajakBPHTB	1,200,000,000	1,509,252,967
PajakRestoran	1,067,000,000	1,339,666,031
PajakMineralbukanLogam&Batuan	400,000,000	800,595,730
PajakReklame	607,075,000	608,734,500
Tahun2014		
PajakBumidanBangunan	13,100,553,320	13,019,032,464
PajakPeneranganJalan	8,416,668,060	8,964,809,132
PajakBPHTB	2,296,554,350	2,800,722,785
PajakRestoran	1,920,000,000	2,011,770,478
PajakMineralbukanLogam&Batuan	599,500,000	652,082,000
HASILRETRIBUSIDAERAH		
Tahun2010		
RetribusiPelayananKesehatan	18,786,488,000	19,604,221,878
RetribusiTempatRekreasi&Olahraga	1,509,650,000	1,656,865,758
RetribusiPelayananPasar	960,017,800	1,079,152,388
RetribusiPengukuran&PengujianHasilHutan	525,000,000	596,011,009
RetribusiPenggantianBiayaAktaCapil&KTP	425,000,000	483,797,000
Tahun2011		
RetribusiPelayananKesehatan	4,533,639,000	4,879,193,190
RetribusiTempatRekreasi&Olahraga	1,847,939,700	2,120,496,971
RetribusiPenggantianBiayaAktaCapil&KTP	796,580,500	1,214,100,500
RetribusiPelayananPasar	1,041,222,900	1,091,964,455
RetribusiTempatPelelanganIkan	400,000,000	357,598,175

Tahun2012		
RetribusiPelayananKesehatan	13,437,241,000	10,946,370,589
RetribusiRetribusiTempatRekreasi&Olahraga	2,861,469,900	3,665,955,845
RetribusiPelayananPasar	1,180,974,789	1,173,150,725
RetribusiPenjualanProduksiUsahaDaerah	764,980,000	745,185,000
RetribusiTempatKhususParkir	645,455,000	644,943,500
Tahun2013		
RetribusiPelayananKesehatan	13,033,271,300	11,926,822,980
RetribusiTempatRekreasi&Olahraga	4,762,117,100	5,760,742,500
RetribusiPelayananPasar	1,166,249,000	1,183,714,050
RetribusiPengendalianMenaraTelekomunikasi	1,030,662,277	1,054,285,363
RetribusiTempatKhususParkir	720,463,000	717,105,000
Tahun2014		
RetribusiTempatRekreasi&Olahraga	12,161,070,000	14,989,421,527
RetribusiPelayananKesehatan	2,924,672,000	3,225,737,450
RetribusiPelayananPasar	1,214,396,500	1,217,849,750
RetribusiTempatKhususParkir	812,400,000	843,046,500
RetribusiPemakaianKekayaanDaerah	680,716,126	834,665,107

III. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Kulonprogo tahun 2010 – 2014

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
PAD 2010	45,501,872,652	48,280,640,675
PAD 2011	50,913,640,001	53,752,293,432
PAD 2012	64,998,319,035	74,028,663,155
PAD 2013	78,430,504,349	95,991,512,851
PAD 2014	131,892,992,137	158,818,431,853
HASIL PAJAK DAERAH		
Tahun 2010		
Pajak Penerangan Jalan	3,293,713,270	3,516,166,922
Pajak Reklame	418,400,000	509,431,384
Pajak Bahan Galian Gol. C	210,471,800	152,628,834

Pajak Restoran	73,090,823	103,400,140
Pajak Hiburan	12,400,000	14,921,600
Tahun 2011		
Pajak Penerangan Jalan	3,691,975,268	3,851,912,298
Pajak Reklame	509,431,384	538,560,952
Pajak Bahan Galian Gol. C	94,108,720	127,815,580
Pajak Restoran	77,090,823	109,798,750
Pajak Hotel	15,225,000	21,521,250
Tahun 2012		
Pajak Penerangan Jalan	4,336,054,430	4,268,637,325
Pajak BPHTB	1,987,000,000	2,831,898,755
Pajak Reklame	501,382,743	528,022,095
Pajak Restoran	305,210,990	395,182,069
Pajak Mineral bukan Logam & Batuan	217,600,000	325,497,700
Tahun 2013		
Pajak Penerangan Jalan	4,563,900,300	4,929,430,583
Pajak BPHTB	1,635,500,000	2,123,143,209
Pajak Restoran	373,501,600	626,388,004
Pajak Reklame	515,475,750	535,226,578
Pajak Mineral bukan Logam & Batuan	378,026,650	376,589,500
Tahun 2014		
Pajak Bumi dan Bangunan	9,286,792,224	10,105,112,159
Pajak Penerangan Jalan	5,496,000,000	5,786,846,889
Pajak BPHTB	4,106,253,195	3,145,030,300
Pajak Restoran	505,445,500	795,137,559
Pajak Mineral bukan Logam & Batuan	400,162,800	687,777,220
HASIL RETRIBUSI DAERAH		
Tahun 2010		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	4,347,462,000	4,466,355,498
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	917,665,000	968,810,825
Retribusi Pelayanan Pasar	533,786,400	540,151,100
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	371,209,000	450,361,069
Retribusi Penggantian Biaya Akta Capil & KTP	377,181,000	358,975,000

Tahun 2011		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	5,294,776,000	4,894,210,933
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	1,326,386,000	1,186,719,500
Retribusi Pelayanan Pasar	547,350,000	558,790,300
Retribusi Penggantian Biaya Akta Capil & KTP	265,201,000	394,472,000
Retribusi IMB	154,800,000	137,911,737
Tahun 2012		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	7,278,019,200	6,861,724,787
RetribusiRetribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	1,370,510,000	1,288,353,000
Retribusi Pelayanan Pasar	914,447,700	669,124,450
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	615,295,905	597,981,423
Retribusi Penggantian Biaya Akta Capil & KTP	233,050,000	338,624,000
Tahun 2013		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	8,389,739,050	9,154,939,391
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	1,415,470,000	1,563,501,500
Retribusi Pelayanan Pasar	892,918,400	749,629,325
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	615,295,905	664,595,892
Retribusi IMB	541,000,000	685,443,956
Tahun 2014		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	1,083,416,290	1,132,090,700
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	917,665,000	968,810,825
Retribusi Pelayanan Pasar	533,786,400	540,151,100
Retribusi IMB	600,000,000	494,057,858
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	228,487,500	230,084,500

IV. Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman tahun 2010 – 2014

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
PAD 2010	163,530,209,690	163,442,921,920
PAD 2011	203,766,407,218	227,108,171,114
PAD 2012	241,003,081,720	301,069,539,284
PAD 2013	342,895,307,198	456,026,490,588
PAD 2014	474,917,917,941	573,343,496,413

HASIL PAJAK DAERAH		
Tahun 2010		
Pajak Penerangan Jalan	32,500,000,000	33,619,390,346
Pajak Hotel	21,326,096,600	22,473,840,945
Pajak Restoran	8,668,000,000	10,195,038,727
Pajak Reklame	8,600,000,000	9,059,573,587
Pajak Hiburan	3,500,000,000	3,793,513,241
Tahun 2011		
Pajak BPHTB	32,500,000,000	49,237,392,683
Pajak Penerangan Jalan	38,400,000,000	40,022,094,803
Pajak Hotel	22,000,000,000	22,637,880,385
Pajak Restoran	13,000,000,000	13,257,484,784
Pajak Reklame	8,750,000,000	9,322,567,271
Tahun 2012		
Pajak BPHTB	49,500,000,000	61,420,703,546
Pajak Penerangan Jalan	40,500,000,000	41,545,531,319
Pajak Hotel	25,000,000,000	32,216,986,820
Pajak Restoran	14,000,000,000	16,758,882,196
Pajak Reklame	9,000,000,000	11,340,140,023
Tahun 2013		
Pajak BPHTB	65,000,000,000	82,359,380,085
Pajak Bumi dan Bangunan	45,000,000,000	57,609,592,471
Pajak Penerangan Jalan	43,000,000,000	49,413,858,615
Pajak Hotel	32,000,000,000	41,502,758,586
Pajak Restoran	17,500,000,000	21,044,463,951
Tahun 2014		
Pajak BPHTB	80,000,000,000	95,980,352,191
Pajak Penerangan Jalan	55,000,000,000	60,121,472,627
Pajak Bumi dan Bangunan	53,000,000,000	59,617,670,782
Pajak Hotel	45,000,000,000	49,800,597,181
Pajak Restoran	23,000,000,000	27,979,616,224
RETRIBUSI DAERAH		
Tahun 2010		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	7,975,000,000	7,754,397,890

Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	5,499,000,000	7,601,982,568
Retribusi IMB	3,400,000,000	4,846,180,214
Retribusi Pelayanan Pasar	3,212,125,200	3,272,564,550
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	2,596,061,280	2,053,407,437
Tahun 2011		
Retribusi IMB	4,761,750,000	7,354,410,741
Retribusi Pelayanan Pasar	3,430,804,200	3,560,982,850
Retribusi Pelayanan Kesehatan	2,256,580,200	2,269,190,128
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP	1,228,100,000	1,785,129,000
Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah	1,741,095,033	1,705,147,033
Tahun 2012		
Retribusi IMB	4,900,000,000	15,799,056,723
Retribusi Pelayanan Pasar	3,827,669,400	3,993,064,425
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	2,082,587,290	2,643,725,887
Retribusi Izin Gangguan	1,200,000,000	1,833,547,270
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP	1,451,050,000	1,202,847,000
Tahun 2013		
Retribusi IMB	9,300,000,000	27,500,540,096
Retribusi Pelayanan Pasar	3,175,195,200	3,605,559,175
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	2,242,640,000	2,740,652,000
Retribusi Izin Gangguan	1,700,000,000	2,366,079,970
Retribusi Pelayanan Kebersihan	1,500,000,000	2,034,353,362
Tahun 2014		
Retribusi IMB	16,000,000,000	20,826,599,850
Retribusi Pelayanan Pasar	3,584,695,900	3,646,921,900
Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga	2,735,000,000	3,396,776,000
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2,934,023,840	3,386,569,612
Retribusi Pelayanan Kebersihan	1,800,000,000	2,134,249,111

V. Laporan Realisasi Anggaran Kota Yogyakarta tahun 2010 – 2014

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH		
PAD 2010	175,872,008,293	179,423,924,652
PAD 2011	203,838,217,886	228,870,559,646
PAD 2012	283,024,524,539	338,283,728,285
PAD 2013	354,321,285,855	383,052,140,420
PAD 2014	404,272,607,099	470,641,528,444
HASIL PAJAK DAERAH		
Tahun 2010		
Pajak Hotel	31,530,000,000	32,515,281,932
Pajak Penerangan Jalan	21,186,000,000	22,461,182,048
Pajak Restoran	12,484,000,000	13,313,057,154
Pajak Hiburan	4,300,000,000	4,646,317,241
Pajak Reklame	5,100,000,000	4,639,213,808
Tahun 2011		
Pajak Hotel	34,000,000,000	37,859,535,936
Pajak BPHTB	20,800,000,000	33,698,986,634
Pajak Penerangan Jalan	22,300,000,000	23,857,657,675
Pajak Restoran	13,355,000,000	13,817,217,336
Pajak Reklame	5,355,000,000	5,439,731,728
Tahun 2012		
Pajak Hotel	61,583,000,000	55,611,097,144
Pajak BPHTB	25,000,000,000	52,928,751,819
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	32,000,000,000	44,116,129,339
Pajak Penerangan Jalan	26,000,000,000	26,167,953,923
Pajak Restoran	16,500,000,000	16,168,131,719
Tahun 2013		
Pajak Hotel	62,000,000,000	68,154,540,528
Pajak BPHTB	47,483,658,627	50,679,970,257
Pajak Bumi dan Bangunan	42,000,000,000	42,397,474,887
Pajak Penerangan Jalan	31,000,000,000	31,362,812,256
Pajak Restoran	18,100,000,000	18,645,297,527

Tahun 2014		
Pajak Hotel	87,675,000,000	80,707,277,300
Pajak BPHTB	55,754,293,000	51,253,098,935
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	42,700,000,000	43,753,961,720
Pajak Penerangan Jalan	34,100,000,000	37,173,738,039
Pajak Restoran	22,325,000,000	24,411,664,427
HASIL RETRIBUSI DAERAH		
Tahun 2010		
Retribusi Pelayanan Pasar	12,148,000,000	13,006,982,663
Retribusi Pelayanan Kesehatan	3,870,207,500	4,803,064,191
Retribusi IMB	3,533,834,000	4,157,401,737
Retribusi Terminal	2,025,000,000	1,984,107,050
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1,850,056,000	1,907,694,500
Tahun 2011		
Retribusi Pelayanan Pasar	13,000,000,000	14,157,620,659
Retribusi Pelayanan Kesehatan	6,029,552,851	6,159,319,395
Retribusi IMB	3,048,575,000	3,695,819,588
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1,963,800,000	1,971,718,000
Retribusi Pelayanan Kebersihan	1,929,606,000	1,935,061,300
Tahun 2012		
Retribusi Pelayanan Pasar	13,527,202,746	13,615,758,571
Retribusi Pelayanan Kesehatan	6,345,958,270	6,617,727,139
Retribusi Terminal	2,312,841,200	2,530,898,200
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2,038,912,500	2,068,743,000
Retribusi Pelayanan Kebersihan	1,986,372,500	1,990,205,700
Tahun 2013		
Retribusi Pelayanan Pasar	12,525,568,676	13,506,244,381
Retribusi Pelayanan Kesehatan	7,378,135,858	8,327,166,400
Retribusi IMB	4,374,262,500	4,820,298,000
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3,241,666,000	3,296,483,500
Retribusi Terminal	2,530,898,200	2,901,812,000
Tahun 2014		
Retribusi IMB	5,000,076,000	18,489,522,050

Retribusi Pelayanan Pasar	14,454,938,562	14,775,858,390
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	9,075,425,000	9,093,990,000
Retribusi Terminal	2,684,160,000	3,002,437,000
Retribusi Pelayanan Kebersihan	2,750,754,000	2,825,144,050

